



MENGUATKAN PELINDUNGAN, MENUTUP CELAH KEJAHATAN

Melalui penguatan kewenangan dan dorongan revisi UU TPPO, Imigrasi memperluas ruang gerak dalam menghadapi perdagangan orang dan kejahatan transnasional yang terus berkembang demi memberikan perlindungan yang lebih konkret bagi masyarakat.



Immigration Lounge

Unit layanan keimigrasian yang berlokasi di **pusat perbelanjaan (mal)** untuk memudahkan **pengurusan paspor elektronik**

Daerah Khusus Jakarta

- **Pondok Indah Mall 3**, Lantai B2
- **Mall Taman Anggrek**, Lantai LG
- **Senayan City**, Lantai 6
- **Kebayoran Park Mall**, Lantai UG
- **PIK Avenue Mall**, Lantai 6
- **Lippo Mall Kemang**, Carpark P5B

DI Yogyakarta

- **Sleman City Hall**, Lantai 2

Kepulauan Riau

- **Pollux Mall Batam Center**,
Lantai G

Sumatra Utara

- **Immigration Lounge Delipark**
Medan, Lantai LM

Jawa Barat

- **Grand Metropolitan Mall**, Bekasi
- **Pesona Square Mall Depok**,
Lantai 3

Jawa Tengah

- **Solo Square Mall**, Lantai 1

Jawa Timur

- **Icon Mall Gresik**, Lantai 2F
- **Ciputra World Mall Surabaya**,
Lantai 4

Biaya

- Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun **Rp650.000**
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun **Rp950.000**
- Percepatan paspor **Rp1.000.000**





MENYEMAI PELINDUNGAN DARI HULU

Edisi kali ini hadir dengan fokus pada upaya penguatan fungsi keimigrasian di tengah tantangan global dan domestik yang makin dinamis. Laporan utama kami mengulas langkah strategis Imigrasi dalam mendorong revisi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai wujud penguatan kewenangan guna memberikan perlindungan hukum yang tidak hanya lebih konkret, tetapi juga mengikuti perkembangan zaman.

Dinamika pengawasan perbatasan dan penegakan hukum menjadi benang merah dalam rubrik *Kerja Kita*. Kami menyajikan laporan lapangan mengenai kegagalan keberangkatan calon jemaah haji nonprosedural, penindakan terhadap jaringan penipuan berkedok asmara internasional di Semarang, hingga deportasi pelaku kejahatan dengan identitas palsu. Langkah-langkah tegas ini mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat dari modus tindak pidana transnasional yang kerap menyasar kelompok rentan.

Selain penegakan hukum, kami menyoroti kehadiran Imigrasi di wilayah-wilayah terpencil. Melalui rubrik *Liputan Khusus*, pembaca diajak melihat kiprah Imigrasi Palopo di Tana Toraja serta upaya pembangunan literasi keimigrasian di desa eks-transmigrasi Puntari Makmur. Inisiatif ini merupakan langkah preventif agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur bekerja ke luar negeri.

Melengkapi sajian, rubrik *Opini* mengulas tantangan baru berupa "kawin semu" dalam modus penipuan berkedok asmara. Sementara itu, rubrik *Pojokomunikasi* dan *Renjana* memberikan perspektif humanis mengenai keseimbangan bekerja serta potret kehidupan suku Laut.

Kami berharap ragam sajian ini memberikan gambaran komprehensif tentang peran dan tanggung jawab Imigrasi yang melampaui pelayanan administratif. Selamat membaca! Semoga informasi ini memberikan kontribusi positif bagi wawasan kita bersama.



cerita sampul

Petugas imigrasi melakukan pencegahan dari hulu untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan orang, sekaligus memperkuat kewenangan hukum melalui dorongan revisi Undang-Undang TPPO sebagai perlindungan yang lebih konkret bagi masyarakat.

PENGARAH

Direktur Jenderal Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN UMUM

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik

Ditjen Imigrasi

PEMIMPIN REDAKSI

Yolanda Rosylvia Juniar

ANGGOTA REDAKSI

Alvie Mubariq Ali, Ajeng Dhyanti Paramitha, Ajeng Rahma Safitri, Arif Rahman Suryaman, Elyan Nadian Zahara, Eka Safitri, Fipit Fatimah, Habil Ashari, I Made Donik Brahmadhi Putra Ardika, Irmadika Natasia Tiominar, Nabila Khansarani, Pandu Suryo Wicaksono, Rendy Firnanda, Rr. Aditya Citraningtyas Ningrum, Rahmad Nur Iriyanto, Rizky Dikara Priatama, Immas Sari Wijaya, Maria Rosalin Tambunan, Yanos Okterano

PENYUNTING BAHASA

Tim Narabahasa

ILUSTRATOR SAMPUL

Gepzki

PENATA LETAK & DESAIN

Tim Narabahasa

PERCETAKAN

Tim Narabahasa

SIRKULASI

Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi

ALAMAT REDAKSI

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X-6, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

KONTAK REDAKSI

majalah.bhumipura@imigrasi.go.id

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan/ artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.

42. Renjana Suku Laut: ANAK SERIBU PULAU DI PERAIRAN LINGGA

DARI REDAKSI

3. Menyemai Pelindungan dari Hulu

LAPORAN UTAMA

8. Revisi Undang-Undang TPPO: Imigrasi Dorong Penguatan Wewenang

LIPUTAN KHUSUS

12. Dari Luwu ke Utara Toraja: Kiprah Imigrasi Palopo di Tanah Sarat Budaya

14. Membangun Literasi Keimigrasian di Desa Eks-Transmigrasi

KEBIJAKAN

16. DGICM ke-29 di Siem Reap: Indonesia Dorong Penguatan Tata Kelola Perbatasan dan Mitigasi Penyelundupan Manusia

KERJA KITA

18. Dua Kali Gagal Berangkat,

Rombongan Haji Nonprosedural Diamankan di Bandara Internasional Kualanamu

20. Imigrasi Semarang Bongkar Dugaan Jaringan Love Scamming Internasional, 4 WN RRT Diamankan

21. Imigrasi Ringkus 210 WNA Terduga Pelaku Penipuan Investasi Daring di Batam

22. Dugaan Sindikat Judol Internasional: Imigrasi Dalam Keterlibatan 320 WNA

24. Imigrasi Deportasi Pelaku Pelecehan Seksual Asal AS Beridentitas Palsu

25. Imigrasi Ngurah Rai Gagal Gagal Keberangkatan WNA Buroan Interpol

KILAS PERISTIWA

26. Penerbangan Internasional Kembali Hadir di Bandara Hanandjoeddin: Imigrasi Tanjungpandan Siap Layani Penumpang

Your Journey Starts with a Click

Apply online from anywhere, arrive in Indonesia seamlessly

evisa.imigrasi.go.id



Your Indonesian visa needs are now at your fingertips.
Access the official portal at:

evisa.imigrasi.go.id



**INDONESIAN
IMMIGRATION**
www.imigrasi.go.id



- 27. Pencegahan dari Desa: Imigrasi Cilegon Imbau Warga Waspadai Modus Kerja Palsu
- 28. Mulai dari Sikap Waspada: Imigrasi Mamuju Edukasi Generasi Muda
- 29. BTV Semesta Berpesta 2026: Imigrasi Hadirkan Layanan Paspor Akhir Pekan
- 30. Semangat Kehumasan dari Dabo Singkep: Kuatkan Kompetensi Insan Imigrasi di Wilayah 3T

INFORMATIPS

- 32. Libur Telah Tiba: 3 Destinasi Ramah Anak di Luar Negeri
- 33. Panduan Dasar Bepergian ke Luar Negeri: Persiapan Matang, Perjalanan Tenang

OPINI

- 34. Kawin Semu dari Love Scamming: Tantangan Baru Pengawasan Keimigrasian
- 36. Penguatan Keimigrasian Memanggil dari Melawi: Potensi Besar di Barat Kalimantan

POJOKKOMUNIKASI

- 38. Tren Zero Post: Ketika Kosong Menjadi Sebuah Sikap
- 40. Tepis Stigma "Si Pemalas": Mengenal ADHD pada Orang Dewasa

RENJANA

- 42. Suku Laut: Anak Seribu Pulau di Perairan Lingga

UMBIES EKSIS

- 44. Tren Usaha Sampingan: Saldo Bertambah, di Kantor Tetap Amanah

KABAR DARI SEBERANG

- 48. Menyisir Harapan di Balik Jeruji Depot Tahanan

RESENSI

- 50. Lepas Ekspektasi: Jaga Hati di Tengah Tuntutan Profesi

52. MATA LENSE 54. KOMIK



BhumiPura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Majalah ini menyajikan berita dan tulisan seputar keimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

BhumiPura saat ini dapat dibaca atau diunduh melalui imigrasi.go.id/majalah.

Layanan Paspor Akhir Pekan: Sehari Langsung Jadi!

Temukan titik **layanan percepatan paspor khusus akhir pekan** terdekatmu di bawah ini.

Lokasi & Waktu Layanan

**Immigration Lounge
Kebayoran Park Mall
(Sabtu)**
Pukul 09.00–12.00

**Immigration Lounge
Mal Taman Anggrek
(Sabtu)**
Pukul 09.00–14.00

**Immigration Lounge
PIM 3 (Sabtu)**
Pukul 09.00–12.00

**Immigration Lounge
Grand Metropolitan
Bekasi (Sabtu)**
Pukul 10.00–14.00

**Immigration Lounge
Pesona Square Depok
(Sabtu)**
Pukul 10.00–15.00

**Immigration Lounge
PIK Avenue (Sabtu)**
Pukul 09.00–16.00

**Immigration Lounge
Solo Square
(Sabtu & Minggu)**
Pukul 10.00–14.00

**UP3 Terminal 3
Soekarno-Hatta Airport
(Sabtu & Minggu)**
Pukul 08.00–11.00

**Immigration Lounge
Delipark Medan (Sabtu)**
Pukul 09.00–14.00

Dokumen Persyaratan

Pemohon dewasa:

- KTP, kartu keluarga, akta kelahiran/ijazah/buku nikah
- Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Pemohon anak di bawah umur:

- KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran/surat baptis
- Bukti menikah orang tua yang sah
- Paspor orang tua (pendamping)
- Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Ajukan permohonan paspormu
melalui aplikasi **M-Paspor**



Dapatkan informasi lebih lanjut melalui Instagram:

@kanimjksel, @imigrasi_jakbar, @imigrasi_jakut,
@imigrasi.soekarnohatta, @imigrasibekasi, @imigrasi_depok,
@kanimsurakarta, @imigrasi_medan



Digital Imaging:
Dedy Damping

REVISI UNDANG-UNDANG TPPO: IMIGRASI DORONG PENGUATAN WEWENANG

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi kompleksnya dinamika perdagangan orang. Padahal, perdagangan orang siber kini menggantikan modus konvensional dengan menyasar korban berpendidikan dan berliterasi digital menengah hingga tinggi.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

S indikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kini tidak hanya mencegat korban di pelabuhan tikus atau memalsukan dokumen di perbatasan fisik. Kejahatan ini telah bermutasi menjadi perbudakan siber yang memanfaatkan teknologi digital dan manipulasi psikologis. Di tengah penurunan angka kasus keimigrasian berdasarkan data administratif, fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam status darurat perdagangan orang akibat kompleksitas modus operandi baru.

Kondisi tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas lembaga yang digelar oleh Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Senin (25/5). Forum yang mempertemukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian HAM (KemenHAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras) itu sepakat bahwa regulasi yang ada saat ini telah gagap menghadapi mutasi modus operandi kejahatan siber lintas negara.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah mendesak untuk direvisi. Regulasi yang telah berumur hampir dua dekade tersebut dinilai kehilangan taji dalam menghadapi taktik pelaku kejahatan yang kini menyasar kelompok masyarakat berpendidikan dengan tingkat literasi digital menengah hingga tinggi.

"Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO sudah tidak mampu lagi merespons kompleksitas [kejahatan] perdagangan orang saat ini yang telah bermutasi dari bentuk konvensional menjadi lebih siber. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar fisik, tetapi juga kemampuan kognitif korban," ujar Anis di hadapan pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI.

Pergeseran Hot Spot Regional

Data keimigrasian mencatat potret yang sekilas tampak positif. Kasus TPPO lintas negara di Indonesia sepanjang periode 2023 hingga 2025 diklaim mengalami penurunan signifikan sebesar 65,92 persen. Namun, angka-angka di atas kertas ini tidak linear dengan realitas ancaman di lapangan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan bahwa penurunan angka statistik keimigrasian mencerminkan efektivitas

"KEJAHATAN INI TIDAK LAGI HANYA MENYASAR FISIK, TETAPI JUGA KEMAMPUAN KOGNITIF KORBAN."



Dirjen Imigrasi dalam RDP bersama Komisi XIII DPR RI dengan pembahasan seputar perdagangan orang (Foto: Aditdja Uwen)

sistem penapisan di pintu-pintu keluar resmi. Meskipun demikian, wilayah kantong pekerja migran tetap menyimpan kerentanan yang tinggi.

“Penurunan jumlah kasus ini tidak berarti ancaman telah hilang. Data juga menunjukkan bahwa tingkat kerentanan masih sangat tinggi, terutama di daerah kantong pekerja migran,” kata Hendarsam.

Berdasarkan pemetaan keimigrasian, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tetap menjadi provinsi asal korban dengan jumlah terbesar. Di tingkat kabupaten, Indramayu, Cilacap, dan Lombok Timur menduduki posisi teratas dalam peta kerentanan nasional.

Kerentanan di daerah-daerah tersebut diperparah oleh pergeseran koridor kejahatan transnasional di Asia Tenggara. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat perbudakan siber berskala global, dengan Kamboja sebagai salah satu episentrum utamanya. Modus operandi yang digunakan bukan lagi sektor domestik atau perkebunan konvensional, melainkan industri penipuan daring (*online scam*).

“Situasi perdagangan orang di Indonesia menunjukkan kondisi darurat. Korban dari kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan pekerja migran mengalami peningkatan tajam,” tutur Anis. Faktanya, sindikat siber ini tidak lagi memikat korban lewat janji gaji pembantu rumah tangga, melainkan lowongan kerja mentereng di bidang teknologi informasi dan layanan pelanggan (*customer service*).

Komnas HAM mencatat bahwa sebagian besar kasus yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah

konflik regional atau negara seperti Kamboja berakar dari skema penipuan daring ini. “Sebesar 85 persen masalah pekerja migran kita, termasuk WNI di Kamboja, adalah kasus penipuan daring. Ini menasar individu dengan literasi digital menengah hingga tinggi melalui manipulasi psikologis prestise pekerjaan teknologi,” ungkap Anis.

Sistem Peringatan Dini dari Hulu

Untuk menghadapi pergeseran modus tersebut, jajaran keimigrasian menerapkan strategi berlapis dari hulu ke hilir guna mencegah keberangkatan nonprosedural. Ekosistem pencegahan ini dimulai dari tingkat desa sebelum dokumen perjalanan diterbitkan.

Di tingkat hulu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengoptimalkan peran 885 desa binaan Imigrasi (DBI) yang dikawal oleh 446 petugas imigrasi pembina desa (pimpasa). Tugas para petugas ini adalah melakukan edukasi langsung dan penyuluhan hukum keimigrasian untuk membongkar kedok sindikat yang mulai masuk ke wilayah pedesaan.

Dari aspek teknologi, sistem pengawasan diperketat melalui integrasi pe-ngelolaan perbatasan atau *border control management* (BCM) dan daftar Subjek Pengawasan atau *Subject of Interest* (Sol) ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Integrasi ini memungkinkan petugas di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) untuk mendeteksi subjek berisiko secara waktu nyata (*real-time*) saat proses interogasi dan profiling dilakukan.

Sepanjang 2025, pendekatan penapisan atau profiling intensif ini diklaim berhasil mencegah

keberangkatan 7.414 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Imbasnya, angka penolakan permohonan paspor yang terindikasi nonprosedural turun hingga 63,97 persen, sementara tindakan penundaan keberangkatan di TPI menyusut 67,85 persen.

“Tren penurunan ini mengindikasikan keberhasilan *early warning system* (sistem peringatan dini) kita. Edukasi dari hulu berhasil membangun kewaspadaan sehingga masyarakat mengurangi niat berangkat secara nonprosedural sebelum sampai ke perbatasan,” kata Hendarsam.

Di luar negeri, fungsi keimigrasian pada perwakilan RI juga dioptimalkan sebagai instrumen perlindungan. Petugas melakukan validasi status izin tinggal saat warga negara mengajukan penggantian paspor. Sepanjang periode 2023–2025, lebih dari 27.000 Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) diterbitkan untuk memfasilitasi pemulangan WNI yang menghadapi masalah hukum dan eksploitasi di luar negeri tempat mayoritas kasus diselesaikan oleh Perwakilan RI di Malaysia.

Keterbatasan Wewenang dan Hambatan Restitusi

Kendati fungsi pencegahan administratif di TPI dan kantor imigrasi berjalan optimal, aparat keimigrasian kerap terhambat oleh ketentuan hukum saat akan melakukan tindakan penegakan hukum yang lebih jauh. Hukum keimigrasian yang berlaku saat ini belum memberikan ruang eksekusi yang fleksibel bagi petugas imigrasi dalam konteks pencegahan TPPO yang bergerak cepat di ranah digital.

“EDUKASI DARI HULU BERHASIL MEMBANGUN KEWASPADAAN SEHINGGA MASYARAKAT MENGURUNGKAN NIAT BERANGKAT SECARA NONPROSEDURAL SEBELUM SAMPAI KE PERBATASAN.”

Oleh sebab itu, Kemenimipras mendesak agar revisi UU TPPO mengakomodasi perluasan kewenangan penindakan di pintu perbatasan. “Kami mendorong penguatan kewenangan Imigrasi dalam revisi UU TPPO agar petugas memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam melakukan profiling, penangguhan penerbitan paspor, hingga penundaan keberangkatan,” ujar Hendarsam.

Menurutnya, sinkronisasi regulasi ini krusial agar penanganan di lapangan tidak terhambat oleh masalah sektoral. “TPPO bukan pelanggaran keimigrasian biasa. Ini adalah kejahatan serius terhadap masa depan negara dan objeknya adalah warga negara kita. Oleh karena itu, Imigrasi harus diberi ruang dan wewenang untuk bertindak lebih cepat, preventif, dan terintegrasi,” tegas Hendarsam.

Di sisi lain, dalam proses peradilan, persoalan yang dihadapi para korban pascapenyelamatan sangat pelik. Pemulihan hak-hak ekonomi korban melalui mekanisme ganti rugi atau restitusi masih jauh dari harapan UU. Sindikat kejahatan sering kali berhasil menyembunyikan aset mereka sebelum proses hukum mencapai pengadilan.

Ketua LPSK Brigjen Pol. (Purn.) Achmadi memaparkan bahwa sepanjang 2024 hingga Mei 2026, terdapat 1.252 permohonan perlindungan kasus TPPO yang masuk ke lembaga tersebut. Permohonan ini didominasi oleh kasus eksploitasi ketenagakerjaan dan eksploitasi seksual.

Meskipun LPSK secara konsisten mengajukan perincian ganti rugi dalam tuntutan pidana terhadap pelaku, eksekusi pembayaran di lapangan masih sangat rendah. Pelaku kejahatan dinilai lebih memilih menjalani hukuman kurungan pengganti (subsider) daripada menyerahkan kekayaan mereka untuk memulihkan kehidupan korban.

“Penilaian restitusi LPSK tiga tahun terakhir mencapai lebih dari Rp16 miliar, tetapi yang dibayar oleh pelaku hanya sekitar 6,65 persen. Belum optimalnya penyitaan aset pelaku menjadi catatan penting kami,” kata Achmadi.

Rendahnya angka pengembalian hak korban ini memperpanjang penderitaan psikososial dan ekonomi yang dialami korban setelah lepas dari jerat sindikat. Oleh karena itu, LPSK mendorong optimalisasi penyitaan aset sejak tahap penyidikan awal serta pengembangan skema dana bantuan korban (*victim*

trust fund) sebagai solusi alternatif penjaminan hak korban ketika pelaku benar-benar tidak mampu membayar

Akar Struktural Perdagangan Orang

Persoalan perdagangan orang tidak dapat diselesaikan secara parsial hanya melalui pengetatan pemeriksaan paspor atau pemberatan sanksi pidana di pengadilan. Selama faktor pendorong di dalam negeri tidak dibenahi, sindikat akan selalu menemukan celah dan cara baru untuk mengeksploitasi masyarakat.

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM Munafrizal Manan mengingatkan pentingnya aspek perlindungan dan pemulihan hak asasi para korban yang kerap mengalami penyiksaan dan eksploitasi. Penanganan TPPO membutuhkan komitmen kolektif yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan untuk memutus rantai pasok kejahatan ini sejak dari lokasi perekrutan.

“Mencegah jauh lebih baik daripada melakukan penanganan setelah peristiwa terjadi. [Untuk itu] diperlukan komitmen kuat lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan di pintu masuk perekrutan,” jelas Munafrizal.

Pandangan ini sejalan dengan catatan investigasi Komnas HAM yang menegaskan bahwa akar masalah TPPO sejatinya bertumpu pada persoalan struktural ekonomi dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Ketiadaan lapangan kerja yang layak di daerah asal dan tingginya angka kemiskinan menjadi bahan bakar utama yang terus menyalakan mesin industri perdagangan orang ini.

“Akar masalah dari TPPO sejatinya terkait dengan hak atas kesejahteraan dan pekerjaan bagi masyarakat. Apabila negara mampu memenuhi kedua hak tersebut, perdagangan orang akan berkurang secara signifikan,” ujar Anis.

RDP di Komisi XIII DPR RI ini menyimpulkan satu arah sebuah kebijakan baru: Penanganan TPPO harus bertransformasi dari pola konvensional-parsial menuju pola penanganan yang terintegrasi, berbasis siber, dan berfokus pada kesejahteraan ekonomi. Pembaruan regulasi melalui revisi UU TPPO, penyesuaian Rencana Aksi Nasional (RAN), serta penguatan koordinasi taktis Gugus Tugas TPPO menjadi prasyarat mutlak jika negara tidak ingin terus-menerus kalah selangkah dari sindikat perbudakan modern. ■

Seorang pria korban perdagangan orang di balik jeruji (ilustrasi) (Foto: Tommy Ariyanto)



Dari Luwu ke Utara Toraja:

KIPRAH IMIGRASI PALOPO DI TANAH SARAT BUDAYA

Warga Toraja Utara harus menempuh perjalanan panjang untuk mengurus dokumen perjalanan. Imigrasi Palopo mengusulkan kantor baru dan program Desa Binaan agar layanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Tim Kantor Imigrasi (Kanim) Palopo mengajak rombongan bersilaturahmi ke Istana Kedatuan Luwu, yang masih aktif dan dipimpin oleh Datu Luwu ke-40 Andi Maradang Mackulau Opu To Bau. Kami dipersilakan masuk ke sebuah aula yang menyimpan berbagai peninggalan kerajaan. Di sana, kami diterima oleh Juru Bicara Istana Kedatuan Uwu Andi Abdullah Sanad Kaddiraja yang juga dikenal dengan sebutan Jemma Tongeng. "Kerajaan ini masih aktif dan memiliki susunan pemerintahan dengan dewan

tertinggi sebanyak 12 orang. Akan tetapi, setelah Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kami sepakat untuk tidak mencampuri urusan pemerintah negara. Sampai sekarang, Kedatuan masih memiliki posisi secara sosial, masih dilibatkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bukan pelanggaran hukum positif. Namun, kini ada satu bentuk hukuman sosial yang sudah tidak bisa kami laksanakan, yaitu dibuang dari wilayah (*persona non grata*)," ujar Andi.

Andi menyampaikan bahwa Kanim Palopo memiliki hubungan baik dengan Kedatuan dan rutin bersilaturahmi dengan anggota Kedatuan yang juga berkarier di pemerintah daerah (pemda). Kanim yang baru naik kelas ini tidak hanya menerbitkan dokumen perjalanan, tetapi juga melayani masyarakat di wilayah kerja luas dengan potensi pariwisata.

Gedung Kantor Baru, Semangat untuk Maju

Tahun 2026 merupakan tahun kedua Kanim Palopo berstatus kelas II. Pada awal 2025, gedung baru dua lantai seluas 593 m² resmi beroperasi dengan fasilitas ramah kelompok rentan (ibu hamil/menyusui, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia). Di belakang kantor tersedia masjid dan mes bertingkat untuk pegawai.

Suasana hangat kunjungan silaturahmi di Istana Kedatuan Luwu bersama Juru Bicara Istana Kedatuan Uwu Andi Abdullah Sanad Kaddiraja (Foto: Pandu Suryo)



Kanim Palopo memiliki enam wilayah kerja yang mencakup Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Toraja Utara. Setiap hari, layanan paspor melayani 60 hingga 70 pemohon, dengan target harian sebanyak 75 pemohon. Adapun tujuan permohonan paspor umumnya adalah untuk ibadah umrah, wisata, dan pertukaran mahasiswa.

Kenaikan kelas Kanim Palopo tidak terlepas dari berbagai inovasi layanan yang telah diterapkan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Palopo Yogie Kashogi menjelaskan, pihaknya menyiapkan petugas layanan pelanggan (*customer service/CS*) untuk mendampingi masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor.

"Masyarakat bisa datang ke petugas tersebut, dan kami akan bantu proses pendaftarannya langsung di aplikasi M-Paspor," ujar Yogie dalam kegiatan Media Tour yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Selasa (19/5).

Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Yulius Lilingan menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan alur pelayanan, Imigrasi Palopo membagi loket pelayanan menjadi dua kategori. "Satu loket khusus untuk pemohon yang sudah berhasil mendaftar dan melengkapi berkas di aplikasi M-Paspor. Satu loket lainnya diperuntukkan bagi pemohon yang belum mengerti atau mengalami kendala dengan aplikasi tersebut. Di sana ada petugas yang *stand by* untuk mengarahkan," kata Yulius.

Sementara itu, dalam hal pelayanan terhadap orang asing, Yogie menyebutkan bahwa banyak mahasiswa asing yang datang ke Palopo dari Timor Leste dan Taiwan. Adapun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Toraja didominasi oleh wisatawan dari negara-negara Eropa.

Menjangkau dan Membina Calon Perantau

Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi Sulawesi Selatan, melalui Kanim Palopo, menggandeng Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk membentuk program Desa Binaan Imigrasi (DBI) sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Program ini menghadirkan petugas langsung ke masyarakat untuk memberikan pendampingan, mulai dari



Petugas Kanim Palopo melayani pemohon melalui program Eazy Passport di Toraja Utara. (Foto: Pandu Suryo)

edukasi preventif hingga kemudahan pengurusan paspor.

"Fokus utama petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) di desa binaan adalah membekali warga dengan pemahaman yang matang agar tidak terjerat modus TPPO. Secara konkret, hal ini dilakukan dengan memastikan seluruh kelengkapan administrasi telah terpenuhi dengan benar dan melalui lembaga yang sah sebelum warga memutuskan untuk bekerja di luar negeri," tutur Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang saat meninjau layanan paspor oleh Kanim Palopo di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Toraja Utara, Rabu (20/5).

Saat ini, dua desa binaan telah resmi beroperasi di Toraja Utara. Friece menegaskan bahwa bekerja di luar negeri sah-sah saja asalkan melalui prosedur resmi agar perlindungan hukum terjamin. Kolaborasi ini disambut baik oleh Inspektur Toraja Utara Anugrah Yaya Rundupadang yang menyebut bahwa koordinasi pengawasan perdagangan orang telah berjalan aktif melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembang).

"Kriteria pemilihan DBI didasarkan pada wilayah yang memiliki mobilitas pekerja migran yang tinggi serta tingkat kebutuhan penduduk desa terhadap layanan keimigrasian," ujar Anugrah.

Potensi Kantor Baru di Toraja Utara

Kanwil Imigrasi Sulawesi Selatan mengusulkan pendirian kanim baru di Kabupaten Toraja Utara untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Alasannya, warga Toraja Utara harus menempuh perjalanan darat lebih dari dua jam menuju Kanim Palopo dengan medan pegunungan, sementara

warga Tana Toraja dan Enrekang memerlukan waktu hingga empat jam ke Kanim Parepare.

Melalui rencana pendirian kanim di Toraja Utara, akses layanan keimigrasian diharapkan dapat menjadi lebih dekat, mudah, dan ramah bagi masyarakat. Kantor ini nantinya dirancang untuk melayani tiga wilayah sekaligus, yakni Tana Toraja, Toraja Utara, dan Enrekang, sehingga dapat menjangkau lebih banyak kebutuhan secara optimal.

Selain aspek pelayanan, keberadaan kanim di wilayah ini juga dinilai penting dari sisi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Sebagai salah satu destinasi wisata dunia, Toraja memiliki mobilitas warga negara asing (WNA) yang cukup tinggi sehingga kehadiran unit kerja Imigrasi akan memperkuat fungsi pengawasan sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Pemda menyambut baik usulan kanim baru di Toraja Utara karena dinilai sangat membantu masyarakat, terutama untuk pengurusan paspor ibadah dan wisata rohani. Tingginya permintaan paspor di wilayah tersebut juga menunjukkan bahwa layanan keimigrasian makin dibutuhkan secara lebih dekat.

Program Eazy Passport sebagai upaya jemput bola sering disambut antusias, dengan jumlah pemohon yang melampaui kuota setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran kanim baru di Toraja Utara bukan sekadar rencana, melainkan kebutuhan nyata masyarakat. Jika usulan ini terealisasi, akses layanan imigrasi diharapkan makin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan melalui pencegahan TPPO dan pekerja migran nonprosedural. ■

Gerbang masuk Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyajikan pemandangan barisan pohon kelapa sawit yang berjejer rapi.

Desa ini awalnya dibangun oleh generasi pertama yang bermigrasi dari Pulau Jawa untuk menyukseskan program transmigrasi dari pemerintah. Penduduk awal desa ini datang membawa modal tekad untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik dengan kemampuan yang sudah sangat mereka kuasai: bertani.

Kemampuan itulah yang diwariskan secara turun-temurun hingga kini—generasi ketiga para transmigran di Desa Puntari Makmur. Sektor nonformal mendominasi urat nadi perekonomian desa ini.

Kemandirian ekonomi masyarakat Desa Puntari Makmur berawal dari program pembagian lahan pada tahun 1990-an ketika setiap kepala keluarga menerima dua jenis lahan, yaitu lahan untuk persawahan dan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam proses pengembangannya, perusahaan memfasilitasi pembukaan kebun sawit masyarakat melalui skema kredit perbankan. Saat ini, seluruh kewajiban kredit tersebut telah dinyatakan lunas oleh warga. Hasil panen sawit dari kebun milik



Irfan Bahroni, Kepala Desa Puntari Makmur (Foto: Dok. Imigrasi Morowali)

MEMBANGUN LITERASI KEIMIGRASIAN DI DESA EKS-TRANSMIGRASI

Kawin campur dengan warga asing bagi warga Puntari Makmur menyimpan risiko eksploitasi. Desa Binaan Imigrasi hadir untuk membangun literasi keimigrasian dari tingkat akar rumput.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

warga kemudian disalurkan ke pabrik-pabrik pengolahan.

Ketahanan Karakter dan Literasi Warga

Irfan Bahroni, Kepala Desa Puntari Makmur memaparkan bahwa warga desa cenderung fokus pada pengelolaan sumber daya yang ada dan tidak terlalu

terpengaruh oleh gaya hidup yang berkembang di media sosial. Karakter kerja keras yang terbentuk sejak masa awal transmigrasi tetap terjaga hingga generasi kedua dan ketiga.

Meski demikian, banyaknya tenaga kerja asing di wilayah Morowali mulai menghadirkan dinamika sosial yang

perlu diantisipasi. Fenomena pernikahan antarnegara, yang lebih dikenal dengan istilah “kawin campur”, terjadi pada warga Desa Puntari Makmur.

Irfan menyebutkan ada warganya yang menikah dengan pria yang bekerja di kawasan industri Morowali, lalu ikut pindah dan menetap di negara asal suaminya, Tiongkok. Fenomena ini cukup mendapat perhatian dari pemerintah desa dan pihak Imigrasi. Hal itu tidak lain untuk memastikan agar pernikahan tersebut sah secara hukum dan para istri terhindar dari risiko

eksploitasi atau penipuan berkedok pernikahan di luar negeri.

Perlindungan Berbasis Komunitas

Irfan mengakui bahwa urusan administrasi serta pemantauan warganya yang pindah ke luar negeri kini menjadi fokus tersendiri bagi pihak desa. “Kemarin, ‘kan, kami masih pusing terkait dengan status mereka, baik status pendidikan maupun perkawinan. Makanya, kemarin saya sambungkan ke pihak Imigrasi supaya mereka komunikasi. Untuk komunikasi dengan keluarga di sini, itu masih oke,” ujar Irfan saat ditemui di kantornya.

Catatan lapangan keimigrasian menunjukkan adanya modus berulang ketika warga negara Indonesia (WNI) dari daerah rural dinikahi oleh warga negara asing (WNA), tetapi setibanya di negara tujuan, mereka justru dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga tanpa gaji untuk merawat keluarga suami. Minimnya literasi membuat masyarakat kerap tidak menyadari potensi bahaya tersebut.

“Mengenai pemahaman warga terhadap kehadiran orang asing, dengan adanya investasi, banyak orang melihat dampak sosial dan ekonomi membawa pengaruh positif. Komoditas yang awalnya dihargai sekian, sekarang bisa meningkat. Namun, di sisi lain, kekhawatiran kita terkait modus-modus eksploitasi orang itu [masih ada]. Masyarakat [di sini] masih belum paham betul,” lanjut Irfan.

Fenomena ini menjadi salah satu alasan Kantor Imigrasi (Kanim) Morowali menjadikan Puntari Makmur sebagai desa binaan Imigrasi (DBI). Melalui pendekatan berbasis masyarakat, petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) memberikan edukasi agar warga terhindar dari perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta eksploitasi oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab.

“Bulan Mei lalu, kami adakan sosialisasi di kantor desa. Fokusnya adalah agar masyarakat tidak tergiur tawaran bekerja ataupun pergi ke luar negeri secara ilegal. Bukan cuma kami yang hadir, kami libatkan juga pihak Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Morowali untuk memberikan edukasi,” jelas Kepala Kantor Imigrasi Morowali Yusva Aditya.

DBI menjadi bentuk pelaksanaan fungsi keimigrasian yang lebih humanis. Fungsi imigrasi tidak lagi diterjemahkan secara sempit melalui layanan di balik

meja. Petugas hadir langsung untuk memberdayakan dan meningkatkan literasi masyarakat.

“Sebagai kantor imigrasi baru, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan ini. Ketika rasa percaya antara warga dan petugas sudah tumbuh, kita bisa menjadi mitra yang saling mendukung, terutama dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan keimigrasian,” imbuh Yusva yang diamini oleh Kepala Desa Puntari Makmur.

“Dengan hadirnya Imigrasi, kami diharapkan dapat menambah wawasan warga terkait modus-modus perdagangan orang. Sebab, kemarin waktu kegiatan sosialisasi, orang jadi engah, ‘Oh, ternyata ketika kita misalnya

mau ke luar negeri, harus melapor dulu ke Imigrasi,” jelas Irfan.

Edukasi yang dilakukan Imigrasi Morowali di Desa Puntari Makmur membuktikan bahwa perlindungan warga negara harus dimulai sejak dini dari tingkat desa, bukan baru bergerak saat masalah muncul di luar negeri. Dengan mengubah pemahaman masyarakat—yang awalnya hanya mengaitkan paspor dengan ibadah umrah menjadi paham akan hak perlindungan negara—program ini menjadi fondasi penting bagi keamanan warga. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, jaminan hukum yang kokoh ini diharapkan dapat mengawal masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidup mereka secara aman dan legal. ■

Puntari Makmur, desa binaan Imigrasi di Wita Ponda, Sulawesi Tengah (Foto: Elyan Nadian Zahara)



DGICM ke-29 di Siem Reap: **INDONESIA DORONG PENGUATAN TATA KELOLA PERBATASAN DAN MITIGASI PENYELUNDUPAN MANUSIA**

Pergeseran kantong keberangkatan ke NTT, Maluku, dan Papua serta modus transfer antarkapal menjadi tantangan baru yang dihadapi Imigrasi Indonesia. Isu-isu ini menjadi fokus utama dalam forum AMICF, HSU, dan AIIF di DGICM ke-29.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Lanskap perbatasan di kawasan Asia Tenggara kini menghadapi dinamika mobilitas lintas negara yang terus meningkat. Situasi tersebut melahirkan berbagai kompleksitas baru yang menuntut respons cepat dan terukur dari otoritas keimigrasian di setiap negara anggota ASEAN.

Guna merespons tantangan tersebut, tiga forum pendahuluan

digelar pada hari pertama ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs Ministers Meeting (DGICM) ke-29, yang berlangsung di Siem Reap, Kamboja, pada Selasa hingga Kamis (23 s.d. 25 Juni). Ketiga forum tersebut adalah ASEAN Heads of Major Immigration Checkpoints Forum (AMICF) yang berfokus pada

pengelolaan perbatasan, Heads of Specialist Unit (HSU) yang membahas penanganan penyelundupan manusia, dan ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF) yang mendalami sinergi intelijen keimigrasian.

AMICF: Standardisasi dan Konektivitas

Dalam forum AMICF, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Suhendra membawa fokus pada transformasi tata kelola perlintasan. Indonesia menekankan bahwa modernisasi perbatasan tidak boleh hanya bertumpu pada pembaruan perangkat keras secara parsial, melainkan harus

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko saat memaparkan tiga pilar nasional penguatan perbatasan Indonesia di DGICM ke-29 (Foto: Achmad Nur Saleh)



menyasar integrasi sistem yang komprehensif. Langkah tersebut krusial mengingat pola perjalanan internasional saat ini yang kian dinamis sehingga setiap pos pemeriksaan dituntut memiliki ketahanan tinggi terhadap lonjakan arus penumpang maupun potensi gangguan teknis.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia memaparkan peta jalan (*road map*) penguatan titik pemeriksaan (*checkpoint*) keimigrasian yang bertumpu pada tiga pilar utama: keandalan sistem, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), dan akuntabilitas tata kelola. Strategi ini diwujudkan melalui standarisasi alur kerja, penguatan tahapan pemeriksaan, serta kejelasan mekanisme eskalasi keputusan. Selain itu, otoritas imigrasi juga mulai mengoptimalkan pemanfaatan data prakedatangan (*advanced data*) agar proses pemprofilan pelintas dapat bergeser menjadi berbasis risiko.

Suhendra menyatakan bahwa implementasi digitalisasi di lini depan perbatasan pada dasarnya ditujukan untuk memperkuat efektivitas pengawasan, bukan mereduksi peran manusia. "Automasi terus kami

kembangkan, termasuk pemanfaatan *autogate* (pintu otomatis) dan sistem digital lainnya. Namun, prinsip yang kami pegang tetap sederhana: Teknologi tidak menggantikan petugas, tetapi memperkuat kapasitas petugas. Karena bagi kami, ukuran keberhasilan bukan pada kebijakan yang dirumuskan, melainkan pada konsistensi implementasi di lapangan," ujar Suhendra di sela-sela sidang AMICF.

Lebih lanjut, Suhendra mengingatkan bahwa konektivitas dan keamanan regional tidak akan optimal jika kualitas pos perbatasan antarnegara ASEAN masih timpang. Oleh karena itu, Indonesia mendorong adanya standarisasi kualitas yang merata di seluruh kawasan melalui skema kerja sama praktis yang fleksibel.

HSU: Pengawasan Berlapis

Sementara itu, dalam forum HSU, pembahasan berfokus pada penanggulangan ancaman penyelundupan manusia dan kejahatan transnasional. Memimpin delegasi Indonesia, Direktur Kerja Sama Keimigrasian Arief Munandar memaparkan implementasi strategi pengawasan berlapis yang membagi fokus penanganan pada fase hulu dan hilir.

Langkah proteksi di hulu dimulai sejak tahap permohonan paspor di kantor-kantor imigrasi melalui wawancara mendalam serta penilaian profil pemohon. Strategi ini kemudian diperkuat di fase hilir, tepatnya di pos-pos pemeriksaan keberangkatan internasional. Di area ini, petugas dibekali kewenangan penuh untuk menunda atau mencegah keberangkatan penumpang yang terindikasi kuat menjadi korban maupun pelaku migrasi ilegal.

Terkait operasional di lapangan, Arief menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan domestik harus didukung oleh saluran komunikasi yang cepat antarnegara anggota. Hal ini diperlukan demi mempercepat respons penegakan hukum.

AIIF: Disrupsi Jalur Penyelundupan

Sesi evaluasi mengenai peta kerawanan baru mengemuka dalam forum intelijen imigrasi se-ASEAN (AIIF). Dipimpin oleh Direktur Teknologi Informasi Keimigrasian Chicco Muttaqin, Indonesia

membeberkan data intelijen keimigrasian sepanjang 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa posisi geografis Indonesia masih kerap dieksploitasi sindikat internasional sebagai jalur transit penyelundupan migran ilegal menuju Australia. Tercatat, Imigrasi Indonesia berhasil mencegah lebih dari 157 individu asal Asia Selatan dan Asia Tengah yang mencoba memanfaatkan jalur nonprosedural ini.

Data menunjukkan adanya pergeseran tren operasional yang signifikan. *Pertama*, terjadi pergeseran kantong keberangkatan tempat sindikat kini mengalihkan titik luncur baru ke wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua, untuk mengeksploitasi celah geografis. *Kedua*, muncul modus operandi baru berupa taktik transfer antarkapal (*ship-to-ship*) di tengah laut untuk menghindari radar pesisir, serta penggabungan migran dari berbagai negara asal guna mengaburkan analisis risiko petugas di lapangan.

Merespons hal tersebut, Imigrasi Indonesia mengubah fokus pengawasan dari pola bertahan menjadi tindakan disrupsi strategis. Penegakan hukum kini diarahkan ke wilayah hulu dan titik hambat domestik, seperti Kendari, Ternate, dan Lombok, sebelum para migran menyentuh wilayah pesisir.

Melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Imigrasi bergerak memutus rantai pasok logistik jaringan kejahatan tersebut. Sementara itu, di tingkat akar rumput, program Desa Binaan Imigrasi (DBI) dioptimalkan untuk mengedukasi masyarakat agar mampu mendeteksi sekaligus mengantisipasi tawaran migrasi yang mencurigakan.

Pada akhir paparan, Chicco Muttaqin menekankan bahwa transparansi dan kecepatan pertukaran informasi antarnegara merupakan kunci utama untuk memutus rantai kejahatan lintas batas. Hal tersebut diperlukan agar upaya penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

"Kita harus mengubah metode operasional kita dari prinsip 'perlu untuk tahu' menjadi kewajiban 'perlu untuk berbagi'. Identitas fasilitator, aliran dana gelap, dan anomali mobilitas harus dapat diakses dengan cepat oleh negara transit," imbuh Chicco.

Ketiga forum ini menegaskan bahwa kekuatan kawasan bergantung pada koordinasi taktis, ketajaman intelijen, dan komitmen berbagi informasi yang berjalan seirama di lapangan demi menjaga stabilitas Asia Tenggara. ■



Dua Kali Gagal Berangkat,

ROMBONGAN HAJI NONPROSEDURAL DIAMANKAN DI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU

Upaya pemberangkatan jemaah haji nonprosedural yang mengaku hendak berwisata digagalkan oleh petugas imigrasi. Pencegahan ini dilakukan melalui penguatan pengawasan dan integrasi data keimigrasian di sejumlah pintu perlintasan internasional Indonesia.

■ Penulis: Nur Huda Rahmawan

Petugas imigrasi Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara menunda keberangkatan 13 warga negara Indonesia (WNI) yang ditengarai hendak menunaikan ibadah haji secara nonprosedural. Rombongan yang mencoba berangkat menggunakan maskapai Malaysia Airlines (MH0861) tujuan Kuala Lumpur ini diamankan di Bandara Internasional Kualanamu pada Kamis (21/5).

Kejadian ini bermula ketika petugas imigrasi di bandara mendapati skor 100 persen pada indikator *Subject of Interest* (Sol) saat pemeriksaan 13 orang WNI di konter imigrasi, yang terdiri atas 8 laki-laki dan 5 perempuan. Kepada petugas, mereka mengaku akan berangkat ke Malaysia untuk berlibur. Petugas kemudian mengarahkan seluruh penumpang tersebut ke ruang pemeriksaan lanjutan (*secondary check*).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sumatera Utara Parliindungan menjelaskan bahwa hasil wawancara mengungkap ketidaksesuaian keterangan dokumen.

"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Malaysia. Namun, setelah pendalaman, mereka mengakui tujuan akhir mereka adalah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa [melalui] prosedur resmi," ujar Parliindungan.

Kepala Kantor Imigrasi Medan Uray Avian menambahkan bahwa petugas mendeteksi salah satu penumpang berinisial SA yang diduga bertindak sebagai koordinator lapangan. Berdasarkan rekam jejak data perlintasan, rombongan ini diketahui telah dua kali mencoba berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 10 Mei 2026 dan

melalui Batam, tetapi berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi setempat.

Keberhasilan pencegahan calon jemaah haji nonprosedural di tiga gerbang utama perlintasan Indonesia merupakan hasil penyelarasan data keimigrasian nasional yang terintegrasi secara waktu nyata (*real-time*). Langkah ini juga sejalan dengan imbauan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk meningkatkan kewaspadaan dalam pemeriksaan keimigrasian selama penyelenggaraan ibadah haji.

Hendarsam menegaskan bahwa modernisasi sistem pengawasan keimigrasian dirancang untuk menutup

celah penyelundupan manusia melalui berbagai modus.

"Integrasi sistem di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) kita saat ini mampu membaca rekam jejak perlintasan secara waktu nyata. Begitu ada subjek mencurigakan, akan kami input sebagai Sol sehingga gerbang perlintasan lain bisa langsung siaga," papar Hendarsam.

Saat ini, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara tengah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) untuk penanganan serta penegakan hukum lebih lanjut terhadap koordinator rombongan.

Imigrasi mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran keberangkatan haji instan tanpa visa resmi. Penggunaan jalur nonprosedural sangat berisiko bagi keamanan, hak-hak legal, dan perlindungan WNI selama berada di Arab Saudi. ■



Petugas imigrasi Bandara Internasional Kualanamu mengamankan calon jemaah haji yang diduga nonprosedural. (Foto: Dok. Kanim Medan)

All Indonesia

Simplify Your Arrival

Integrated Passenger Declaration System

Fill it in
**up to 3 days
before arriving**
in Indonesia



or access via
allindonesia.imigrasi.go.id

Now **available at**



IMIGRASI SEMARANG BONGKAR DUGAAN JARINGAN LOVE SCAMMING INTERNASIONAL, 4 WN RRT DIAMANKAN



Barang bukti yang ditemukan di lokasi (Sumber: semarang.imigrasi.go.id)

Empat WN RRT ditangkap Imigrasi Semarang karena diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk *love scamming*. Petugas menyita 604 ponsel dan ratusan kartu SIM.

■ Penulis: Yasser Bagas Sentono

Kantor Imigrasi (Kanim) Semarang bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Jawa Tengah menangkap empat warga negara (WN) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga melakukan penipuan daring dengan modus penipuan berkedok cinta (*love scamming*). Para pelaku ditangkap dalam operasi pengawasan keimigrasian di kawasan

Perumahan Puri Eksekutif, Puri Anjasmoro, Semarang Barat, pada Kamis (4/6) sekitar pukul 23.30 WIB.

Kepala Kantor Imigrasi Semarang Ari Widodo menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) selama dua minggu. "Pengungkapan ini merupakan hasil kerja intelijen keimigrasian serta sinergi

yang baik antara Kanim Semarang dan Kanwil Ditjenim Jawa Tengah," jelas Ari pada Jumat (5/6).

Empat WN RRT yang ditangkap berinisial HJ (40), HK (44), HY (44), dan TW (37). Selain mereka, petugas juga mengamankan dua warga negara Indonesia (WNI), DS (26) dan E (26), untuk dimintai keterangan terkait peran keduanya.

Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita barang bukti elektronik dalam jumlah besar. Barang bukti tersebut meliputi 604 unit telepon genggam berbagai merek, 11 unit laptop, 10 unit komputer *all-in-one* (AIO), 1 unit *hard disk*, 1 unit proyektor, 1 unit printer, 1 perangkat *wireless* portabel, ratusan kartu SIM, serta tiga paspor RRT.

Berdasarkan pemeriksaan awal, para pelaku diduga menjalankan aksi *love scamming* menggunakan platform komunikasi digital, seperti DingTalk dan DingDing. Modus yang digunakan adalah membuat profil palsu untuk membangun hubungan emosional dengan korban guna memperoleh keuntungan finansial. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa target dan korban dari jaringan ini seluruhnya berada di luar wilayah Indonesia.

Para warga negara asing (WNA) tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif. Mereka diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait penyalahgunaan izin tinggal. Selain itu, salah seorang WNA yang tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah juga dikenakan Pasal 119 undang-undang yang sama.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk implementasi kebijakan selektif (*selective policy*) keimigrasian Indonesia. "Imigrasi tidak akan memberikan ruang bagi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal maupun memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai basis kegiatan ilegal," tegas Hendarsam. ■

IMIGRASI RINGKUS 210 WNA TERDUGA PELAKU PENIPUAN INVESTASI DARING DI BATAM

Imigrasi membongkar dugaan aktivitas penipuan investasi daring di Batam. Sebanyak 210 WNA diamankan. Ratusan komputer dan ponsel disita.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap 210 warga negara asing (WNA) yang ditengarai terlibat dalam penipuan investasi daring. Penangkapan tersebut dilakukan dalam operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (6/5). Dari 210 WNA yang ditangkap, 125 di antaranya berasal dari Vietnam, 84 berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan 1 orang warga negara (WN) Myanmar, dengan komposisi 163 laki-laki dan 47 perempuan.

Penangkapan dilakukan setelah petugas menemukan indikasi bahwa para WNA tersebut menyalahi izin tinggal dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan tidak satu pun izin tinggal mereka sah digunakan untuk bekerja di Indonesia. Tercatat 160 orang di antaranya menggunakan bebas visa kunjungan (BVK) dan *visa on arrival* (VoA), 49 orang menggunakan visa kunjungan

indeks D12/B12, dan 1 orang dengan izin tinggal terbatas investor.

"Operasi ini bermula dari informasi intelijen yang kami terima pertengahan April lalu. Infonya ada sekelompok WNA beraktivitas mencurigakan di apartemen di sekitar Lubuk Baja. Dari situlah tim kami menindaklanjuti dengan melakukan pengawasan selama beberapa pekan. Hasil pemantauan mengindikasikan bahwa lokasi tersebut digunakan sebagai pusat aktivitas yang ditengarai ilegal," papar Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, tim gabungan yang terdiri atas 58 personel bergerak menuju lokasi pada 6 Mei 2026, pukul 06.00 WIB. Sekitar pukul 08.00 WIB, petugas berhasil mengamankan para WNA untuk dibawa ke Kantor Imigrasi Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga mengamankan sejumlah besar barang bukti, seperti 131 unit komputer, 93 laptop, 492 telepon genggam, 52 monitor,

perangkat jaringan, mesin penghitung uang, dan 198 paspor. Selain itu, petugas juga mengamankan 10 paspor yang diduga terkait dengan pihak pengendali kegiatan di lokasi lain.

Pemeriksaan perangkat elektronik di lokasi kejadian mengarahkan dugaan petugas pada aktivitas penipuan investasi daring atau *scam trading* yang menasar WNA, khususnya di kawasan Eropa dan Vietnam. Modusnya, antara lain, melakukan promosi melalui media sosial, menjalin komunikasi intensif, lalu mengarahkan korban untuk menanamkan dana pada platform investasi fiktif dengan iming-iming keuntungan tinggi.

Saat ini, para pelanggar telah ditempatkan di ruang detensi untuk menjalani proses deportasi dan penangkalan. Mereka diduga melanggar Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) juga akan dilakukan apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam pemeriksaan lanjutan. ■

Konferensi pers penangkapan 210 WNA di Batam (Foto: Alfiqri Anshari)



Dugaan Sindikat Judol Internasional: **IMIGRASI DALAMI KETERLIBATAN 320 WNA**

Maraknya kasus tindak pidana yang melibatkan WNA di Indonesia mendorong Imigrasi untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. WNA dari enam negara diperiksa secara intensif; sebanyak 320 diduga menjadi sindikat judol internasional.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mendalami dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan 320 warga negara asing (WNA) terduga sindikat judi *online* (judol) internasional. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan bersama (*joint investigation*) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas pengungkapan kasus di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Para WNA tersebut terdiri atas 224 laki-laki dan 96 perempuan yang berasal dari Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Myanmar, Laos, Thailand, dan Malaysia.

Untuk pendalaman status keimigrasian dan dugaan pelanggaran hukum,

sebanyak 224 WNA laki-laki tersebut dipindahkan pada Minggu (10/5) ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta, sementara WNA perempuan ditempatkan di Ditjen Imigrasi. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa mayoritas mereka menggunakan izin tinggal kunjungan (ITK), *visa on arrival* (VoA), dan bebas visa kunjungan (BVK). Selain itu, juga teridentifikasi sebanyak 15 pihak penjamin (sponsor) yang bertanggung jawab atas keberadaan para WNA tersebut di Indonesia.

Menanggapi maraknya kasus tindak pidana yang melibatkan WNA belakangan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko me-

negaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing akan terus diperkuat. Dalam beberapa waktu terakhir, tercatat sedikitnya lima pengungkapan kasus sindikat yang melibatkan WNA di sejumlah wilayah Indonesia. Mayoritas WNA yang diamankan berasal dari Vietnam dan Kamboja yang merupakan negara penerima fasilitas bebas visa.

Hendarsam juga menyebutkan bahwa persepsi yang muncul dari sejumlah pihak mengenai lengahnya pengawasan keimigrasian tidaklah tepat. Data menunjukkan bahwa selama periode 1 Januari–5 Mei 2026, Imigrasi telah melaksanakan sebanyak 6.779 tindakan



Pendataan 320 WNA yang ditangkap di Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Foto: Habil Ashari)



Sejumlah WNA yang diduga sindikat judi internasional di lokasi penangkapan (Foto: Habil Ashari)

administratif keimigrasian (TAK). Dari jumlah tersebut, pembatalan izin tinggal dan pendeportasian masing-masing berjumlah 2.026 penindakan, pendetensian sebanyak 1.404 penindakan, dan 1.323 lainnya masuk dalam daftar penangkalan.

"Saya perlu meluruskan bahwa Imigrasi tidak 'kebobolan'. Sebaliknya, keberhasilan penangkapan WNA di berbagai lokasi justru membuktikan efektivitas fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dini pelanggaran oleh WNA. Kami juga menjalin koordinasi yang baik dengan Polri dan kemarin akhirnya dilakukan operasi penangkapan terhadap 320 WNA di Hayam Wuruk," imbuh Hendarsam.

Lebih lanjut Hendarsam menjelaskan, "Hasil pemeriksaan pada beberapa lokasi penangkapan WNA terduga scammer (penipu) menunjukkan banyak [terduga pelaku] yang bahkan belum sempat beroperasi dan beberapa baru beroperasi. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita bekerja secara proaktif sebelum tindak pidana terjadi secara luas."

Dalam memproses dugaan tindak pidana, Imigrasi tidak hanya menasar individu orang asing, tetapi juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sponsor atau penjamin. Imigrasi juga berhak untuk memproses hukum apabila baik orang asing maupun sponsor terindikasi terlibat dalam tindak pidana.

"Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Keimigrasian, penyidik kami (penyidik pegawai negeri sipil/PPNS) juga memiliki wewenang untuk

memproses hukum dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan baik oleh orang asing ataupun sponsornya," jelas Hendarsam.

Selain pengawasan di lapangan, Imigrasi memastikan integrasi sistem mampu mendeteksi tinggal lajak (*overstay*). Dengan integrasi ini, tidak ada WNA melanggar aturan yang dapat meninggalkan Indonesia tanpa sanksi, mulai dari denda administratif, deportasi, hingga masuk ke daftar penangkalan (cegah-tangkal).

Sementara itu, untuk mengantisipasi WNA yang merugikan datang ke Indonesia, Imigrasi melakukan beberapa metode pencegahan, seperti melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap WNA yang tertangkap di Indonesia untuk mengetahui jaringan-

nya. Selain itu, pemeriksaan dan analisis juga dilakukan terhadap sponsor atau penjamin para WNA tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan dan analisis didapat identitas WNA yang dicurigai sebagai anggota sindikat, Imigrasi akan menetapkan WNA tersebut sebagai *subject of interest* (Sol) agar dapat diantisipasi ketika akan masuk Indonesia.

"Kasus-kasus yang melibatkan WNA dalam aktivitas ilegal, termasuk yang berasal dari negara penerima fasilitas bebas visa kunjungan, menjadi bahan evaluasi bagi kami. Semangat 'Imigrasi untuk Rakyat' kami harapkan mampu memitigasi risiko sosial dan ekonomi akibat aktivitas ilegal warga asing guna memastikan prinsip selektif tetap berjalan optimal dalam menjaga keamanan negara," tambah Hendarsam.

Dalam memperkuat pengamanan, Imigrasi juga terus membangun kolaborasi intensif dengan Polri. Sinergi ini diwujudkan melalui mekanisme pemeriksaan bersama guna menangani kejahatan lintas negara secara tuntas. Kebijakan fasilitas BVK pun menjadi perhatian tersendiri dengan maraknya keterlibatan WNA penerima fasilitas dalam kasus-kasus pelanggaran.

"Dalam perspektif pengawasan keimigrasian, kami menegaskan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang dapat berada di wilayah Indonesia. Setiap bentuk pelanggaran, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal, seperti perjudian *online*, akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tutup Hendarsam. ■

Pengamanan WNA perempuan yang didetensi di Direktorat Jenderal Imigrasi (Foto: Habil Ashari)



IMIGRASI DEPORTASI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL ASAL AS BERIDENTITAS PALSU

Bersembunyi di dalam bunker rumahnya di kawasan Sawangan, Depok, seorang WN Amerika Serikat pelaku pelecehan seksual berhasil ditangkap setelah 15 tahun berganti-ganti identitas di Indonesia. Tidak hanya melakukan deportasi, Imigrasi juga melakukan penangkalan seumur hidup.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap seorang warga negara (WN) Amerika Serikat (AS) berinisial AW alias BW alias AYW alias JW di dalam bunker kediamannya di Sawangan, Depok, Jawa Barat. AW diketahui masuk ke Indonesia pada 7 November 2011 dengan tujuan menghindari proses hukum atas kasus pelecehan seksual yang pernah dilakukannya di Amerika Serikat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi menerima surat permohonan bantuan penangkapan AW dari Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat pada 5 Maret 2026. "Menindaklanjuti permohonan tersebut, kami segera melakukan prapenyidikan dan serangkaian tindakan intelijen hingga akhirnya yang bersangkutan berhasil diamankan pada 23 April 2026 di wilayah

Sawangan, Depok," ujar Hendarsam.

Kasus ini mulai terungkap setelah seorang perempuan berinisial NM bersama dua anaknya mendatangi Ditjen Imigrasi pada 5 Desember 2024. NM melaporkan bahwa izin tinggalnya telah habis selama sekitar lima tahun akibat pembatasan pergerakan oleh suaminya, AW. Ia juga mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang bersangkutan di Amerika Serikat. Imigrasi kemudian memfasilitasi kepulangan NM dan anaknya ke Amerika Serikat pada 7 Desember 2024.

Selanjutnya, Ditjen Imigrasi melakukan koordinasi intensif dengan Kedubes Amerika Serikat untuk menelusuri rekam jejak AW hingga akhirnya memperoleh konfirmasi terkait status hukum yang bersangkutan. AW berkali-kali mengganti identitasnya selama 15 tahun sejak masuk ke Indonesia. Yang bersangkutan menjadi WN Amerika Serikat melalui skema naturalisasi pada 4 Mei 2000 dan memiliki paspor Amerika Serikat yang habis masa berlakunya pada 2010.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi masyarakat, tim menemukan keberadaan AW dan berhasil mengamankannya meskipun pihak keluarga sempat menghalangi upaya petugas. Secara keimigrasian, AW telah melakukan pelanggaran serius, termasuk penggunaan identitas palsu dan penyalahgunaan dokumen perjalanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Imigrasi mengenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa pendetensian dan deportasi kepada AW pada 4 Juni 2026 dengan pengawasan dari U.S. Marshals Service. Penangkalan seumur hidup juga dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Permenimipas) Nomor 13 Tahun 2025. Selain itu, Imigrasi juga berkoordinasi dengan otoritas Amerika Serikat untuk proses hukum lebih lanjut di negara asalnya. ■

AW (keempat dari kiri), buronan tindakan pelecehan seksual asal AS (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Buron Interpol yang ditengarai menggunakan identitas palsu (Foto: Dok. Kanim Ngurah Rai)



dengan petugas tata operasi darat (*ground handling*) dan otoritas bandara untuk menghentikan penerbangan, lalu memerintahkan pesawat kembali dari landas pacu (*runway*) menuju Terminal VIP. Setelah pesawat berhasil dipaksa kembali, petugas melakukan penyisiran dan menemukan GAM sedang bersembunyi di dalam toilet pesawat, sementara tiga penumpang lainnya berada di kabin.

Hasil pemeriksaan lanjutan mengungkap bahwa paspor Brasil atas nama GAM tersebut adalah palsu. Identitas asli pria berusia 55 tahun itu adalah AP, seorang WN Venezuela kelahiran Whyalla, Australia. Lebih lanjut, sistem mendeteksi bahwa AP masuk dalam daftar HIT Interpol dengan skor kecocokan 100 persen sebagai tersangka. Berdasarkan informasi dari Biro Pusat Nasional (National Central Bureau/NCB) Canberra, AP diduga merupakan buronan yang tengah dicari oleh aparat

IMIGRASI NGURAH RAI GAGALKAN KEBERANGKATAN WNA BURONAN INTERPOL

Upaya pengawasan keimigrasian kembali menunjukkan peran penting petugas dalam mencegah pelanggaran hukum. Imigrasi Ngurah Rai berkoordinasi dengan pihak terkait berhasil menghentikan penerbangan seorang WN Venezuela yang masuk daftar buronan Interpol.

■ Penulis: Dewa Rika Priantana

Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Rai berhasil menggagalkan upaya keberangkatan seorang pria warga negara (WN) Venezuela yang merupakan buronan Interpol dan diduga terlibat dalam tindak pidana lintas negara. Pelaku menggunakan dokumen perjalanan milik orang lain untuk mengelabui petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Sabtu (6/6), sekitar pukul 22.00 WITA.

Kejadian bermula ketika petugas imigrasi melaksanakan pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang pesawat pribadi CAPA JET dengan nomor penerbangan N917CJ pada rute Denpasar menuju Maputo, Mozambik, di Terminal Selatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pesawat tersebut membawa tiga orang awak yang tetap berada di dalam pesawat (*stay on board*) dan empat orang penumpang warga

negara asing (WNA), yaitu ARR (WN Portugal), GAM (WN Brasil), GS (WN Italia), serta FMJ (WN Brasil).

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan menjelaskan, "Petugas kami mendeteksi kejanggalan pada seorang penumpang berpaspor Brasil atas nama GAM, sementara tiga penumpang lainnya dinyatakan aman." Penumpang tersebut tidak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal yang sah di Indonesia.

"Petugas memutuskan untuk menunda keberangkatan GAM demi pemeriksaan mendalam. Namun, sebelum tindakan lebih lanjut diambil, seluruh penumpang justru menyusup ke dalam pesawat tanpa izin, dan pesawat tersebut bersiap lepas landas tanpa mengindahkan arahan petugas," lanjut Bugie.

Untuk merespons situasi tersebut, petugas imigrasi segera berkoordinasi

penegak hukum internasional terkait kasus tindak pidana lintas negara.

Kanim Ngurah Rai segera berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional (Dishubinter) Polri untuk mendalami kasus serta berkomunikasi dengan penegak hukum asing. Secara paralel, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memeriksa pesawat beserta seluruh muatannya. Karena adanya indikasi keterlibatan subjek dalam jaringan kejahatan transnasional, kerja sama internasional juga dilakukan bersama Badan Penegakan Narkoba (Drug Enforcement Administration/DEA) Amerika Serikat (AS) dan Polisi Federal Australia (Australian Federal Police/AFP). Sebagai tindak lanjut, seluruh penumpang, awak, dan pesawat tersebut secara resmi dikenakan penundaan keberangkatan demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

"Kami menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi buronan maupun pelaku kejahatan lintas negara untuk menjadi bagian Indonesia sebagai tempat pelarian. Langkah ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam semangat 'Imigrasi untuk Rakyat', yaitu hadir untuk melindungi bangsa dan melayani masyarakat," pungkas Bugie. ■

Penerbangan Internasional Kembali Hadir di Bandara Hanandjoeddin: **IMIGRASI TANJUNGPANDAN SIAP LAYANI PENUMPANG**

Setelah terhenti karena pandemi Covid-19, penerbangan internasional kembali dibuka di Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Pulau Belitung. Dengan hadirnya rute internasional ini, TPI udara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjungpandan siap melayani para penumpang serta wisatawan mancanegara.



Petugas imigrasi memeriksa dokumen penumpang yang akan melintas di Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjungpandan. (Sumber: tanjungpandan.imigrasi.go.id)

■ Penulis: Shifa Rahmani Zallianty

Penerbangan perdana pesawat Scoot Airlines dengan rute Singapura-Belitung pada Minggu (3/5) menandai kembali aktifnya tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) udara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjungpandan yang merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Tanjungpandan. Penerbangan internasional reguler ini juga menandai bangkitnya konektivitas global dari dan ke Pulau Belitung setelah terhenti pada 2020 karena pandemi Covid-19.

Pesawat Scoot Airlines dengan nomor penerbangan TR284 tiba di Bandara H.A.S. Hanandjoeddin pada pukul 06.15 WIB dengan membawa 80

penumpang yang di antaranya 57 warga negara asing (WNA). Dengan didominasi pemegang bebas visa kunjungan (BVK), mayoritas WNA tersebut berasal dari Singapura. Selain Singapura, tercatat juga WNA berpaspor Malaysia, Vietnam, Filipina, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Inggris, serta Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, untuk rute Belitung-Singapura dengan nomor penerbangan TR285, Imigrasi Tanjungpandan mencatat 38 penumpang yang terdiri atas 30 warga negara Indonesia (WNI) dan 8 WNA.

Sebagaimana tugas dan fungsinya, Imigrasi Tanjungpandan melaksanakan

fungsi pelayanan dan pengawasan di TPI udara H.A.S. Hanandjoeddin Tanjungpandan ini. Prosedur pemeriksaan dilaksanakan sebaik mungkin agar kegiatan perlintasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta mengedepankan kemudahan bagi pengguna layanan keimigrasian.

Annie, salah seorang penumpang, memberikan apresiasi atas kinerja profesional dari petugas imigrasi Tanjungpandan. "Ramah dan profesional. Sekarang, saya tidak sabar untuk bersantai dan menjelajahi destinasi yang indah di Belitung," ujar WNA berpaspor Singapura tersebut.

Pada kesempatan penerbangan perdana Scoot Airlines ini, Kepala Kanim Tanjungpandan Heryansyah Daulay yang langsung hadir di Bandara H.A.S. Hanandjoeddin menegaskan komitmen jajarannya untuk memberikan pelayanan keimigrasian terbaik kepada seluruh penumpang. "Kami dari Imigrasi Tanjungpandan menyambut baik penerbangan perdana ini. Pelayanan yang ramah, cepat, dan bebas pungli akan mewarnai kinerja kami," sebut Heryansyah.

Heryansyah menyebut Imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga pintu gerbang negara yang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan keimigrasian, seperti optimalisasi penggunaan platform All Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko yang berfokus pada aspek kemudahan bagi pengguna layanan keimigrasian sebagai esensi spirit "Imigrasi untuk Rakyat".

Dengan menggunakan pesawat jenis Embraer E190-E2, maskapai Scoot Airlines dijadwalkan melayani rute Bandara Changi (Singapura) menuju Bandara H.A.S. Hanandjoeddin (Belitung) dan sebaliknya setiap Minggu dan Rabu. Kembali beroperasinya rute internasional ini menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara serta memperkuat posisi Belitung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. ■

Kantor Imigrasi (Kanim) Cilegon menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) Penguatan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di wilayah kerja Desa Ciwaduk, Kota Cilegon pada Rabu (6/5). Bertempat di balai warga, kegiatan tersebut dipandu langsung oleh Fitri Daniyati selaku pimpasa di wilayah kerja Desa Ciwaduk. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keimigrasian masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kejahatan transnasional mulai dari lingkup desa.

Dalam kegiatan tersebut, Imigrasi Cilegon memaparkan berbagai materi keimigrasian, mulai dari digitalisasi layanan melalui aplikasi M-Paspor, edukasi perbedaan visa dan izin tinggal, hingga penjelasan mengenai batas kewenangan antara Imigrasi dan Bea Cukai agar tidak terjadi miskonsepsi di tengah masyarakat. Hadir sebagai narasumber, Kepala Subseksi (Kasubsi) Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Infokim) Fegan Akbar bersama Analis Keimigrasian Ahli Muda Aryo Bagus Permono.

Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto menyampaikan bahwa program Pimpasa merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. "Pimpasa menjadi garda terdepan kami untuk memastikan informasi keimigrasian tersampaikan dengan benar hingga ke akar rumput. Ini merupakan langkah preventif agar masyarakat teredukasi dengan baik terkait prosedur yang benar serta terhindar dari potensi penyalahgunaan dan eksploitasi," ujar Aditya.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Ida Bagus Oka Adnyana Manuaba menyoroti aspek penegakan dan kepatuhan hukum sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ia memberikan atensi khusus terkait maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kami mengimbau warga Desa Ciwaduk untuk ekstra waspada terhadap modus penipuan kerja seperti *online scamming* (penipuan dalam jaringan), magang fiktif, hingga eksploitasi anak buah kapal (ABK). Ada sanksi pidana yang sangat berat, baik bagi pelaku penyelundupan manusia yang bisa dipenjara hingga maksimal

Pencegahan dari Desa: **IMIGRASI CILEGON IMBAU WARGA WASPADAI MODUS KERJA PALSU**

Mulai dari modus magang fiktif hingga eksploitasi ABK, Imigrasi Cilegon imbau warga Ciwaduk waspada terhadap TPPO. Lewat program Pimpasa, negara hadir memberikan edukasi keimigrasian langsung dari tingkat desa.

■ Penulis: Farras Abdillah

15 tahun, maupun bagi pemohon yang memberikan data palsu saat pengajuan paspor. Jika ingin bekerja di luar negeri, pastikan melalui jalur yang legal seperti Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) atau BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)," tegas Ida Bagus.

Sementara itu, terkait digitalisasi dan kemudahan akses informasi, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikkim) Budi Irawan menyampaikan bahwa

Imigrasi Cilegon terus mendorong kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan teknologi.

"Melalui edukasi M-Paspor, kami ingin masyarakat merasakan kemudahan [pembuatan paspor], mulai dari pendaftaran akun hingga penentuan jadwal kedatangan. Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan informasi resmi (PABOA) melalui nomor 0822-9984-1694," ujar Budi. ■

Pemberian cendera mata dari Kantor Imigrasi Cilegon kepada perwakilan Desa Ciwaduk (Sumber: cilegon.imigrasi.go.id)



Mulai dari Sikap Waspada: **IMIGRASI MAMUJU** **EDUKASI GENERASI MUDA**

Dokumen palsu hingga adopsi ilegal jadi celah eksploitasi manusia usia produktif. Imigrasi Mamuju hadir membentengi masyarakat dengan literasi prosedur resmi bekerja ke luar negeri.

■ Penulis: M. Arief Setiawan

Kantor Imigrasi (Kanim) Mamuju menggelar sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada Rabu (6/5). Kegiatan ini merupakan respons terhadap ancaman eksploitasi manusia yang menyasar kelompok usia produktif dengan kedok tawaran pekerjaan di luar negeri.

Kepala Kanim Mamuju V. Yosa Anggara dalam sambutannya menekankan pentingnya literasi mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri bagi masyarakat usia produktif. Menurutnya, pemahaman yang matang akan menjadi benteng

pertahanan utama agar masyarakat tidak terjebak dalam sindikat kriminal yang terorganisasi.

"Generasi muda saat ini menjadi salah satu kelompok yang cukup rentan terhadap berbagai modus TPPO, terutama melalui iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi, kesempatan bekerja di luar negeri, maupun tawaran yang terlihat menjanjikan, tetapi tidak jelas legalitasnya," ujar Yosa. Ia mengingatkan agar masyarakat selalu melakukan kroscek terhadap setiap tawaran yang datang melalui media sosial.

Sosialisasi pencegahan perdagangan orang oleh Kantor Imigrasi Mamuju (Sumber: mamuju.imigrasi.go.id)

Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal (Gakkum Patnal) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Sulawesi Barat Rahmat memaparkan materi mengenai upaya oknum dalam mengelabui petugas imigrasi. Ia menjelaskan bahwa modus operandi yang sering ditemukan meliputi penggunaan dokumen palsu atau dokumen yang dipalsukan demi memperoleh paspor, serta pemberian keterangan yang tidak benar pada saat wawancara keberangkatan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

Dari sisi penegakan hukum kepolisian, Kepala Unit IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mamuju Ipda Saskia Arum Pratidina mengupas berbagai bentuk modus operandi yang kini makin beragam. Ia

mengungkapkan bahwa TPPO tidak hanya terbatas pada lowongan kerja palsu, tetapi juga berkembang melalui modus pengantin pesanan, tawaran beasiswa atau magang palsu, hingga praktik adopsi anak secara ilegal yang berujung pada eksploitasi.

Upaya edukasi ini sejalan dengan arahan Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko yang menginstruksikan jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia untuk aktif terjun ke masyarakat. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen "Imigrasi untuk Rakyat", yang mana fungsi Imigrasi tidak sekadar administratif, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi kedaulatan dan keamanan warga negara. Melalui sosialisasi ini, Kanim Mamuju berharap masyarakat menjadi lebih waspada dan tidak tergiur cara-cara instan yang melanggar aturan. ■



Suasana Stadion Kridosono, Yogyakarta, tampak berbeda pada Sabtu (9/5). Sejak pagi, ribuan warga memadati area stadion untuk mengikuti BTV Semesta Berpesta 2026. Kemeriahan langsung terasa melalui berbagai aktivitas, mulai dari jalan sehat; pembagian hadiah lawang (*doorprize*) mobil; stan kuliner usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); hingga parade kostum unik. Riuh penonton muda juga mulai terlihat sejak sore untuk menanti penampilan musisi idola, seperti Aftershine, PorteloN Koplo, Traffic Jam, dan Rony Parulian.

Di tengah hiruk pikuk festival hiburan, sebuah stan putih menarik perhatian pengunjung. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bersama Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Yogyakarta hadir di sana. Melalui strategi jemput bola, Imigrasi membuka stan khusus untuk melayani pengurusan dokumen perjalanan langsung di lokasi acara.

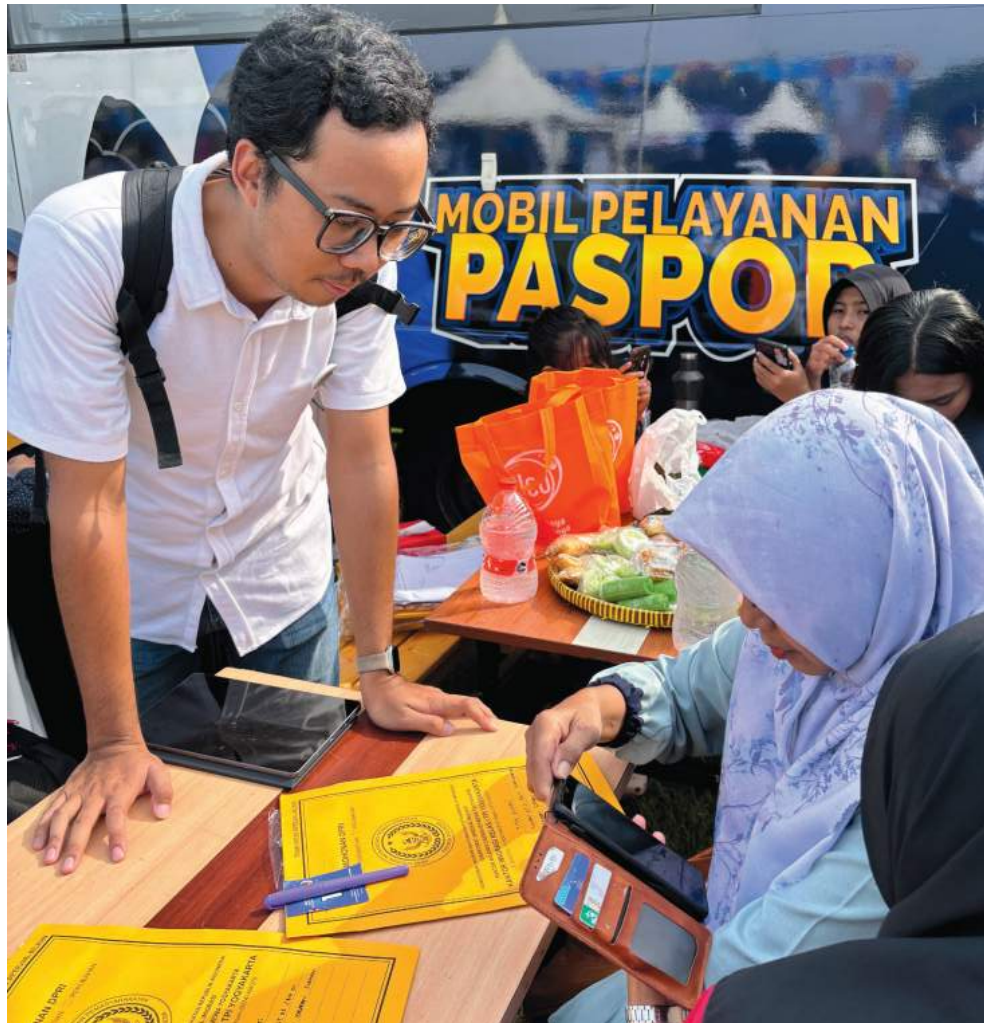
Layanan paspor pada hari libur ini menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama mereka yang kesulitan meluangkan waktu pada hari kerja. Ditjen Imigrasi menyediakan kuota layanan paspor untuk 100 pendaftar, baik untuk permohonan baru maupun penggantian.

Langkah aktif ini dilakukan untuk mengubah paradigma pelayanan publik. Pemerintah tidak hanya pasif menunggu di kantor resmi, tetapi juga bergerak mendekati titik keramaian masyarakat agar akses layanan menjadi lebih cepat dan mudah.

Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta Dwi Adrianto menegaskan bahwa kehadiran stan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran hukum terkait dokumen perjalanan.

"Kami ingin memastikan masyarakat tidak perlu repot mencari layanan paspor. Dengan hadir langsung di acara seperti ini, kami berharap makin banyak warga yang terbantu dan sadar pentingnya memiliki dokumen perjalanan," ujar Dwi di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada Sabtu (9/5) lalu.

Kolaborasi antara Ditjen Imigrasi dan BTV ini menjadi potret sinergi antara instansi pemerintah dan pihak swasta dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Selain melayani pembuatan paspor, stan ini juga menjadi tempat



Suasana pengurusan paspor di festival BTV Semesta Berpesta 2026 (Foto: Dok. Kanim Yogyakarta)

BTV Semesta Berpesta 2026: IMIGRASI HADIRKAN LAYANAN PASPOR AKHIR PEKAN

Layanan keimigrasian turut meramaikan festival BTV Semesta Berpesta 2026. Di stan khusus, Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta hadir untuk memberikan kemudahan pengurusan dokumen perjalanan bagi masyarakat.

■ Penulis: Alvie Mubariq Ali

edukasi bagi pengunjung untuk mengenal berbagai inovasi digital keimigrasian yang kini berorientasi pada kemudahan pengguna.

Melalui momentum BTV Semesta Berpesta 2026, Ditjen Imigrasi

berharap pendekatan interaktif seperti ini dapat terus diperluas ke berbagai wilayah lain. Harapannya, seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat menjangkau layanan keimigrasian dengan efisien. ■



Penyerahan cendera mata kepada Kepala Kanim Dabo Singkep Patri La Zaiba oleh narasumber dari Ditjen Imigrasi, Rendy Firnanda (Foto: Dok. Kanim Dabo Singkep)

Semangat Kehumasan dari Dabo Singkep: **KUATKAN KOMPETENSI INSAN IMIGRASI DI WILAYAH 3T**

Dari Dabo Singkep, Imigrasi membuktikan bahwa inovasi dan penguatan komunikasi publik dapat lahir dari wilayah 3T. Lokakarya ini menjadi ruang belajar, berbagi pengalaman, dan membuka potensi terpendam insan humas di kepulauan.

■ Penulis: Rendy Firnanda

Lantai dua Cafe Tige Berlian, Dabo Singkep, tampak lebih sibuk dari biasanya pada Selasa (19/5). Sejak malam hingga pagi hari, panitia terlihat mondar-mandir memastikan seluruh persiapan kegiatan berjalan tanpa kendala. Mulai dari layar presentasi, susunan kursi, hingga jaringan internet diperiksa berulang kali. Bahkan, susunan acara pun terus disimulasikan demi memastikan setiap sesi berjalan lancar sesuai rencana.

Di tengah kesibukan tersebut, para peserta mulai berdatangan satu per satu. Mereka datang membawa semangat dan harapan dari tiap-tiap unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau untuk memperkuat komunikasi publik

yang lebih adaptif dan dekat dengan masyarakat. Mereka bahkan telah tiba dan menginap sehari sebelumnya setelah menempuh perjalanan panjang dari wilayah perbatasan terluar di Kepulauan Riau.

Bagi sebagian peserta, perjalanan menuju Dabo Singkep tidaklah mudah dan singkat. Peserta dari Ranai, Natuna, misalnya, harus menempuh perjalanan hingga belasan jam melalui kombinasi penerbangan dan jalur laut. Begitu pula peserta dari Tarempa, Kepulauan Anambas, yang harus melintasi perairan antarpulau sebelum akhirnya tiba di lokasi kegiatan. Sementara itu, peserta dari Batam, Tanjungpinang, Belakang Padang, dan Tanjung Uban juga harus melintasi perairan laut selama ± 5 jam

perjalanan dengan jadwal kapal penyeberangan yang terbatas.

Meskipun perjalanan tidak mudah, seluruh peserta tetap antusias mengikuti lokakarya (*workshop*) kehumasan Imigrasi se-Kepulauan Riau tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non-TPI Dabo Singkep. Kegiatan ini mengusung tema "Penguatan Strategi Kehumasan Imigrasi melalui Sinergi Direktorat Jenderal Imigrasi dan UPT dalam Membangun Citra Positif serta Pelayanan Publik di Era Digital".

Semangat Jejaring dari Wilayah 3T

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Tikkim) Imigrasi Dabo Singkep Wibisono Panca

Putra selaku ketua panitia pelaksana menyampaikan bahwa lokakarya tersebut tidak hanya menjadi sarana peningkatan kompetensi. Kegiatan ini juga memperkuat jejaring komunikasi antarsesama insan humas Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau.

“Workshop ini kami harapkan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menjadi ruang belajar dan ruang bertukar pengalaman antar-UPT se-Kepulauan Riau. Kami juga ingin menunjukkan bahwa meskipun berada di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), Imigrasi Dabo Singkep tetap mampu berinovasi dan ikut mendorong penguatan komunikasi publik di lingkungan Imigrasi,” ujar Wibisono.

Sementara itu, Kepala Kanim Dabo Singkep Patri La Zaiba menegaskan bahwa fungsi kehumasan saat ini tidak lagi hanya sekadar penyampai informasi. Fungsi tersebut telah berkembang menjadi ujung tombak dalam membangun persepsi publik dan memperkuat citra positif institusi.

“Pada era digital hari ini, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Oleh karena itu, insan humas Imigrasi dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga mampu menyampaikan informasi secara tepat dan akurat, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, karakteristik wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura menghadirkan tantangan komunikasi publik yang tidak

sederhana. Tingginya mobilitas orang asing, aktivitas lintas negara yang padat, wilayah kerja yang tersebar antarpulau, serta derasnya arus informasi di media sosial menuntut insan humas Imigrasi untuk mampu menyampaikan informasi secara cepat dan akurat.

Menguak Potensi Tersembunyi

Lokakarya ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, yakni Rendy Firnanda, I Made Donik Brahmadi Putra Ardika, dan Alfiqri Anshari, yang membawakan materi mengenai strategi komunikasi publik, pengelolaan media sosial, dan fotografi kepemimpinan. Dalam sesi pembuka, peserta diajak memikirkan satu pertanyaan sederhana, “Apa yang paling diingat masyarakat dari Imigrasi?”

Pertanyaan tersebut menjadi awalan diskusi mengenai pentingnya komunikasi publik pada era digital. Sebab, yang paling diingat masyarakat bukan hanya aturan yang disampaikan, melainkan juga cara institusi menyampaiannya. Mulai dari cara petugas menjelaskan informasi di loket, berbicara di depan publik, menjawab pertanyaan masyarakat, hingga menyampaikan pesan melalui media sosial—semuanya turut membentuk citra institusi di mata publik.

Peserta juga diperkenalkan pada strategi pengelolaan media sosial Ditjen Imigrasi. Strategi tersebut meliputi teknik membuat *hook*, menyusun

rencana konten (*content plan*), hingga membuat strategi kolaborasi konten bersama berbagai pihak, termasuk pemanfaatan *key opinion leader* (KOL).

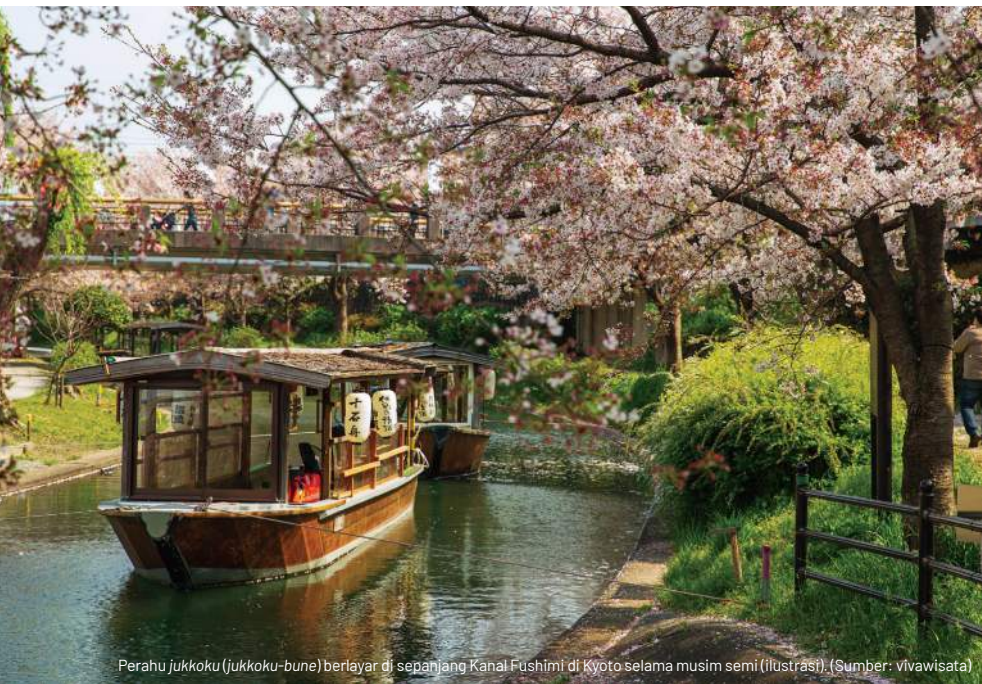
Sementara itu, dalam sesi fotografi kepemimpinan, peserta mempelajari berbagai teknik fotografi. Mereka juga belajar tentang pentingnya etika, kemampuan membaca momentum saat kegiatan, dan koordinasi antartetugas humas selama proses dokumentasi berlangsung.

Diskusi berlangsung interaktif. Para peserta berbagi cerita mengenai tantangan komunikasi publik di wilayah masing-masing, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga pengelolaan media sosial institusi. Namun, di balik diskusi tersebut, lokakarya ini juga membuka banyak potensi yang selama ini jarang terlihat. Ada peserta yang ternyata memiliki kemampuan fotografi yang baik dan pernah meraih juara lomba fotografi. Ada pula yang terbiasa menjadi pemandu acara atau *master of ceremony* (MC) dalam berbagai kegiatan.

Dari Dabo Singkep, sebuah pesan sederhana kembali ditegaskan: Menjaga citra institusi tidak hanya dilakukan dari pusat pemerintahan atau kota-kota besar, tetapi juga dari wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari pulau-pulau yang jauh dari hiruk pikuk ibu kota itulah, para insan Imigrasi terus menjaga wajah institusi melalui pelayanan, komunikasi, dan pengabdian yang mungkin tidak selalu terlihat mata, tetapi tetap dirasakan masyarakat hingga ke garis terluar Indonesia. ■

Suasana lokakarya komunikasi publik bagi Imigrasi se-Kepulauan Riau (Foto: Dok. Kanim Dabo Singkep)





Perahu jukung (jukung-bune) berlayar di sepanjang Kanal Fushimi di Kyoto selama musim semi (ilustrasi). (Sumber: vivawisata)

Libur Telah Tiba:

3 DESTINASI RAMAH ANAK DI LUAR NEGERI

Mulai dari wisata di perkotaan hingga melintasi alam, bersantai tanpa merogoh kocek di taman hingga berbelanja, tiga destinasi ramah anak ini membuat liburan keluarga ke luar negeri makin aman dan menyenangkan.

■ Penulis: Irnadika Natasia T.

"Libur telah tiba! Libur telah tiba! Hore, hore, hore!" Menyambut libur tengah tahun, redaksi *Bhumipura* mengulik tiga destinasi luar negeri yang ramah anak (*family-friendly*). Pemilihan negara didasarkan pada kemudahan mobilitas, keragaman wisata, serta keamanan negara tersebut.

Singapura: Dari Bandara hingga Taman Kota

Negara pertama yang dapat dikunjungi adalah Singapura. Jika di Indonesia pemandangan kota (*city view*) sulit dinikmati tanpa polusi udara, Singapura siap menyuguhkan tata kota yang ciamik dengan kualitas udara yang sehat. Negara tetangga ini memiliki

transportasi umum yang terintegrasi. Luasnya yang tidak terlalu besar membuat Singapura mudah dijelajahi. Wisata Anda dapat dimulai sejak mendarat di Bandara Changi. Sembari menunggu waktu lapor masuk (*check-in*) penginapan, Anda dapat langsung mengunjungi Jewel Changi Airport dan menyaksikan air terjun dalam ruangan (*indoor*) tertinggi di dunia, Rain Vortex.

Singapura juga terkenal dengan wisata luar ruangan (*outdoor*) gratis. Anda dapat mengunjungi ikon wisata Negeri Singa, yaitu Merlion Park. Berfoto dengan patung Merlion merupakan sebuah keharusan bagi para wisatawan asing. Terdapat pula taman-taman rindang yang cocok menjadi tempat bersantai, seperti Marina Barrage.

Berpiknik gratis di taman sembari menikmati suguhan lanskap kota Singapura adalah ide yang menarik. Jangan lupa untuk berwisata kuliner karena Singapura memiliki lebih dari 50 restoran berbintang Michelin.

Jepang: Rekreasi Lengkap Keluarga

Ingin menikmati negara berempat musim dengan tempat wisata yang beragam? Jepang dapat menjadi pilihan destinasi wisata Anda. Jepang juga merupakan pusat ikon mainan anak, seperti Hello Kitty, Doraemon, Pokemon, dan lainnya. Bagaikan paket lengkap, Anda dapat menikmati kesibukan kota Tokyo, mencoba kereta cepat *shinkansen*, menyantap makanan khas Jepang, serta mengunjungi taman hiburan.

Bagi para orang tua, Jepang juga menjadi surga belanja elektronik dan fesyen merek internasional. Anda juga dapat memperoleh barang bekas dengan harga miring dan kualitas terjamin. Tak perlu khawatir dengan agenda yang padat karena fasilitas umum untuk anak di Negeri Sakura sangat andal, mulai dari trotoar yang ramah kereta dorong bayi (*stroller*), toilet umum khusus ibu dan anak, hingga mesin penjual otomatis (*vending machine*) makanan anak.

Australia: Wisata Kota dan Alam

Apabila Anda memiliki anggaran lebih, Australia juga dapat menjadi pilihan destinasi wisata bersama keluarga. Negeri Kanguru menyimpan banyak tempat wisata, mulai dari berkeliling di kota besar seperti Sydney dan Melbourne, mengunjungi museum-museum kenamaan, hingga menyusuri pantai yang bersih dan tenang.

Selain memiliki transportasi umum yang ramah anak dan tepat waktu, Australia juga menawarkan wisata perjalanan darat (*road trip*) yang menarik. Hal ini disebabkan oleh iklim Benua Australia yang bervariasi di setiap wilayah delapan negara bagian. Dengan perjalanan darat, Anda memiliki waktu yang fleksibel untuk menjelajahi negara-negara bagian tanpa khawatir terjebak kemacetan ataupun melintasi jalanan yang rusak.

Dengan pemilihan destinasi yang tepat, perjalanan keluarga ke luar negeri dapat menjadi pengalaman berharga yang penuh cerita dan kenangan. Pastikan setiap perjalanan dipersiapkan dengan baik agar seluruh anggota keluarga dapat menikmati liburan dengan tenang. ■

PANDUAN DASAR BEPERGIAN KE LUAR NEGERI:

Persiapan Matang, Perjalanan Tenang

Perjalanan internasional yang lancar dimulai dari persiapan dokumen yang matang. Dari mengecek masa berlaku paspor hingga mengisi formulir kedatangan digital, semua perlu diketahui sebelum keberangkatan.

■ Penulis: Alvie Mubariq Ali

Tren perjalanan internasional warga negara Indonesia (WNI) terus meningkat, baik untuk liburan, studi, maupun urusan bisnis. Agar agenda perjalanan lintas negara berjalan lancar, kesiapan dokumen keimigrasian dan pemahaman terhadap regulasi menjadi faktor krusial yang harus dipersiapkan sejak awal.

Persiapan Dokumen

Langkah pertama yang wajib dipastikan adalah masa berlaku paspor. Berdasarkan standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), paspor harus memiliki masa berlaku paling singkat enam bulan sebelum tanggal kedatangan di negara tujuan. Ketentuan ini bersifat universal. Maskapai penerbangan dan petugas imigrasi berhak menolak keberangkatan penumpang di ban-

dara jika persyaratan ini tidak terpenuhi.

Selain paspor, pelajari kebijakan visa negara tujuan. Setiap negara memiliki otoritas penuh untuk menentukan persyaratan masuk bagi warga negara asing (WNA), baik berupa fasilitas bebas visa, *visa on arrival* (VoA), maupun visa reguler yang harus diajukan beberapa minggu sebelum keberangkatan. Kelalaian dalam memenuhi syarat aktivitas dan durasi tinggal dapat menyebabkan pelaku perjalanan ditolak masuk sehingga harus dipulangkan pada kesempatan pertama.

Saat ini, proses imigrasi di dalam negeri sudah jauh lebih efisien berkat digitalisasi. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyediakan aplikasi resmi untuk pengurusan paspor, mulai dari pendaftaran, pemilihan jadwal, hingga

pengunggahan dokumen. Fasilitas gerbang otomatis (*autogate*) di sejumlah bandara internasional di Indonesia juga telah dioptimalkan untuk mempercepat antrean pemeriksaan paspor elektronik, baik saat keberangkatan maupun kepulangan.

Antisipasi Digital

Sebelum melakukan penerbangan, siapkan salinan digital seluruh dokumen penting, seperti paspor, visa, tiket pesawat, dan polis asuransi perjalanan. Simpan dokumen tersebut di penyimpanan awan (*cloud*) yang dapat diakses secara luring (*offline*). Langkah ini penting sebagai antisipasi jika dokumen fisik hilang atau rusak selama perjalanan.

Hal lain yang sering terlewat adalah kewajiban mengisi formulir kedatangan atau deklarasi bea cukai digital sebelum mendarat. Beberapa negara kini mewajibkan pelancong mengisi data tersebut secara daring 48 hingga 72 jam sebelum jadwal kedatangan. Menyelesaikannya sebelum berangkat akan menghindarkan Anda dari antrean panjang dan kepanikan di area kedatangan bandara tujuan.

Terakhir, catat nomor kontak dan alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara tujuan. Informasi ini berfungsi sebagai saluran bantuan resmi jika terjadi kondisi darurat di luar negeri. Persiapkan dokumen yang matang dan pemahaman regulasi yang valid menjadi kunci perjalanan internasional yang aman, terukur, dan nyaman tentunya. Selamat berlibur! ■

Sumber: freepik.com



Kawin Semu dari *Love Scamming*: TANTANGAN BARU PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Sembilan WNA dideportasi di Tangerang dalam operasi *love scamming*. Kawin semu kini menjadi tantangan baru yang menuntut pengawasan keimigrasian berbasis intelijen.

■ Penulis: Junaidul Fitriyono

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan lintas negara menjadi makin kompleks. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian sebagai negara, termasuk Indonesia, adalah meningkatnya praktik penipuan berkedok romansa (*love scamming*), yaitu penipuan yang memanfaatkan hubungan emosional dan romantis untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dalam perkembangannya, modus ini tidak lagi berhenti pada pemerasan atau penipuan finansial, tetapi mulai bertransformasi menjadi bentuk yang lebih sistematis melalui praktik kawin semu (*marriage fraud*). Dari sudut pandang keimigrasian, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan fasilitas izin tinggal yang diberikan negara kepada orang asing melalui jalur perkawinan campuran.

Sah secara Formal, tetapi Merugikan

Pada prinsipnya, negara menjamin hak setiap orang untuk melangsungkan perkawinan yang sah, termasuk perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa fasilitas keimigrasian yang melekat pada perkawinan campuran berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam sejumlah kasus di berbagai negara, hubungan yang diawali melalui media sosial atau aplikasi kencan berkembang menjadi perkawinan yang sebenarnya hanya bertujuan untuk memperoleh legalitas tinggal, menghindari pembatasan keimigrasian, atau memfasilitasi aktivitas ilegal lainnya. Fenomena inilah yang dikenal sebagai kawin semu, yaitu perkawinan yang secara formal sah, tetapi tidak dilandasi niat untuk

membentuk kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.

Nilai kebaruan isu ini terletak pada keterkaitan antara kejahatan siber dan penyalahgunaan sistem keimigrasian. Selama ini, *love scamming* lebih banyak dipandang sebagai tindak pidana penipuan yang merugikan korban secara ekonomi. Padahal, apabila pelaku berhasil membangun hubungan emosional yang kuat dengan korban, tidak tertutup kemungkinan hubungan tersebut diarahkan menuju perkawinan demi memperoleh keuntungan keimigrasian. Dengan kata lain, perkawinan dapat dijadikan instrumen untuk memperoleh izin tinggal yang lebih stabil dan berjangka panjang. Oleh karena itu, pencegahan *love scamming* tidak dapat hanya dengan mengandalkan pendekatan pidana atau literasi digital semata, tetapi juga membutuhkan penguatan fungsi pengawasan keimigrasian.

Penegakan Hukum dan Deteksi Dini

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi ancaman tersebut melalui berbagai operasi pengawasan dan penindakan terhadap jaringan *love scamming* internasional. Pada Juli 2025, Ditjen Imigrasi mendeportasi sembilan WNA yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal untuk melakukan penipuan daring dengan modus *love scamming*. Dalam operasi tersebut, ditemukan puluhan telepon genggam, tablet, dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menjalankan aksi penipuan secara terorganisasi. Para pelaku bahkan tergabung dalam grup komunikasi yang secara khusus digunakan untuk menjalankan aktivitas *love scamming* lintas negara. Mereka kemudian dikenakan tindakan administratif keimigrasian

(TAK) berupa deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan.

Upaya penegakan hukum tersebut berlanjut pada Januari 2026 ketika Ditjen Imigrasi berhasil membongkar sindikat *love scamming* internasional di Tangerang. Sebanyak 27 WNA diamankan dalam operasi yang dilakukan berdasarkan hasil pemprofilan, pengumpulan informasi, dan pendalaman terhadap sejumlah lokasi yang dicurigai sebagai basis operasi kejahatan siber. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jaringan *love scamming* telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang memanfaatkan mobilitas manusia, teknologi digital, dan celah pengawasan lintas sektor. Bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, jaringan tersebut diketahui menggunakan teknologi akal imitasi (*artificial intelligence/AI*) untuk mendukung aktivitas penipuan.

Dalam konteks pencegahan kawin semu, langkah Ditjen Imigrasi tidak hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga melalui penguatan deteksi dini. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjadi landasan penyelenggaraan keimigrasian Indonesia. Prinsip terse-



but menegaskan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang dapat masuk dan berada di wilayah Indonesia. Melalui prinsip tersebut, setiap permohonan visa maupun izin tinggal harus melalui proses verifikasi yang memadai untuk memastikan tidak terdapat indikasi penyalahgunaan fasilitas keimigrasian.

Intelijen Imigrasi dan Sinergi Multisektor

Salah satu strategi yang dapat terus diperkuat adalah optimalisasi fungsi intelijen keimigrasian. Melalui kegiatan pemrofilan, analisis pola perjalanan, pemeriksaan sponsor, hingga pengawasan lapangan, petugas dapat mengidentifikasi indikator-indikator yang mengarah pada perkawinan semu. Contoh indikator tersebut, antara lain, hubungan yang terjalin dalam waktu sangat singkat sebelum perkawinan, ketidaksesuaian keterangan antara pasangan, tidak adanya kehidupan bersama setelah perkawinan, atau adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Pendekatan berbasis risiko semacam ini memungkinkan pengawasan dilakukan

secara lebih efektif tanpa mengurangi hak-hak individu yang menjalani perkawinan campuran secara sah.

Keberhasilan pencegahan dan penindakan terhadap kawin semu juga sangat bergantung pada kolaborasi multisektor. Ditjen Imigrasi tidak dapat bekerja sendiri karena informasi yang diperlukan tersebar di berbagai instansi. Dalam konteks administrasi kependudukan, sinergi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi penting untuk melakukan verifikasi data identitas dan status perkawinan. Kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diperlukan dalam pengungkapan tindak pidana penipuan, pencucian uang, maupun kejahatan siber yang menyertai praktik *love scamming*. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan instansi pencatat sipil dapat mendukung validasi dokumen perkawinan yang menjadi dasar pemberian fasilitas keimigrasian.

Pada tingkat yang lebih luas, kolaborasi juga perlu melibatkan lembaga pengawas transaksi keuangan, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, hingga masyarakat sebagai sumber informasi awal. Pengalaman Ditjen Imigrasi dalam mengungkap berbagai

jaringan *love scamming* menunjukkan bahwa laporan masyarakat dan kegiatan pengawasan lapangan masih menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mendeteksi keberadaan orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

Pada akhirnya, kawin semu sebagai bentuk lanjutan dari *love scamming* merupakan tantangan baru yang menuntut adaptasi kebijakan dan penguatan pengawasan keimigrasian. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi keimigrasian, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk kejahatan transnasional yang lebih luas.

Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi perlu terus mengembangkan pengawasan berbasis intelijen, memperkuat pemanfaatan teknologi informasi, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, fungsi keimigrasian dapat berjalan secara humanis melalui perlindungan terhadap WNI yang rentan menjadi korban, tetapi tetap tegas dalam menindak setiap penyalahgunaan fasilitas keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara, keamanan masyarakat, dan integritas sistem izin tinggal Indonesia. ■



Penipuan berkedok romansa atau *love scamming*
(ilustrasi)(Sumber: southstarbank.com)



Penguatan Keimigrasian Memanggil dari Melawi:

POTENSI BESAR DI BARAT KALIMANTAN

Langkah pemerintah menetapkan 18 kantor imigrasi baru menjadi upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan di berbagai wilayah Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat, masih banyak daerah yang memerlukan kehadiran unit kerja serupa.

■ Penulis: Uray Vhira Aprilia

Hujan yang mengguyur Kabupaten Melawi pada pertengahan April lalu menyisakan kubangan lumpur

di beberapa titik ruas Jalan Trans-Kalimantan. Bagi warga Nanga Pinoh—ibu kota kabupaten, perjalanan menuju Kabupaten Sanggau menjadi wahana uji

ketahanan fisik dan isi dompet. Jarak sekitar 170 kilometer itu harus ditempuh dalam waktu empat hingga lima jam berkendara, melewati aspal mengelupas dan jembatan kayu yang berderit setiap kali dilintasi kendaraan berat.

Bagi sebagian orang, perjalanan melelahkan ini terpaksa dilakoni demi selembar dokumen—paspor. Hingga pertengahan 2026, Kabupaten Melawi belum memiliki kantor pelayanan keimigrasian sendiri. Seluruh urusan dokumen perjalanan, mulai dari



Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
(Sumber: Wikimedia)

permohonan paspor baru untuk pekerja migran, pengurusan dokumen umrah, hingga pengawasan warga negara asing (WNA) masih mengindik pada Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Sanggau.

Situasi ini memicu ironi di tengah gempuran digitalisasi birokrasi yang kerap didengungkan di Jakarta. Saat aplikasi seluler menjanjikan pelayanan “satu klik selesai”, ratusan ribu warga di pedalaman Kalimantan Barat masih harus bertaruk dengan waktu dan kondisi jalan yang tak menentu.

Melawi sebenarnya bukan daerah tertinggal yang mati suri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Melawi, wilayah ini dihuni oleh lebih dari 220.511 jiwa. Pertumbuhan ekonominya mencatatkan angka 4,23 persen, sebuah capaian yang dalam beberapa sektor melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku daerah ini telah

menembus angka Rp7,8 triliun, dengan PDRB per kapita berada di kisaran Rp31,66 juta per tahun. Angka-angka statistik ini terlihat dalam geliat riil di lapangan: hamparan perkebunan kelapa sawit yang terus meluas, perdagangan lintas batas yang dinamis, serta arus investasi yang mulai mengalir masuk ke berbagai sektor strategis.

Dinamika ekonomi tersebut otomatis mengubah lanskap demografi dan mobilitas penduduk. Pemerintah daerah mencatat bahwa aktivitas korporasi di wilayah ini telah melibatkan tenaga kerja asing, di antaranya berasal dari Malaysia dan Korea Selatan. Mereka beroperasi di sektor perkebunan dan infrastruktur. Kehadiran para ekspatriat ini memperlihatkan bahwa arus mobilitas internasional sudah menjadi realitas sehari-hari di Melawi.

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi yang solid ini tidak berbanding lurus dengan kemudahan akses layanan publik mendasar seperti keimigrasian. Konsekuensi dari ketimpangan geografis ini paling berat dirasakan oleh kelompok masyarakat bawah, seperti petani sawit kecil, buruh perkebunan, atau ibu rumah tangga (IRT) yang berniat mencari nafkah di Negeri Jiran atau menunaikan ibadah ke tanah suci. Mengurus paspor bagi mereka berarti harus merelakan waktu kerja sehari-hari untuk melakukan perjalanan dan mengalokasikan ongkos transportasi yang besar. Bahkan, jika proses verifikasi berkas tidak selesai dalam satu hari kerja, mereka perlu siap sedia biaya penginapan dan konsumsi di Sanggau. Kesenjangan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan distribusi pelayanan publik di luar Pulau Jawa.

Pertumbuhan ekonomi di Melawi yang cukup pesat menarik perhatian berbagai aktivitas investasi, termasuk kehadiran tenaga kerja asing. Dinamika ini tentu membutuhkan ruang pengawasan yang lebih intensif dan melekat. Selama ini, aparatur keimigrasian sebenarnya tetap menjalankan tugas dengan optimal. Hanya saja, rentang kendali wilayah kerja Kantor Imigrasi Sanggau memang terhitung sangat luas, mencakup area ratusan kilometer. Keterbatasan geografis inilah yang kerap menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan, terutama ketika harus segera merespons potensi pelanggaran izin

tinggal di tengah keterbatasan ruang gerak dan jarak yang membentang luas.

Sebagai salah satu provinsi yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia, Kalimantan Barat memiliki karakteristik kerawanan wilayah yang khas. Jalur-jalur tikus dan mobilitas informal antarnegara telah menjadi tantangan klasik desentralisasi. Dalam konteks ini, penguatan fungsi keimigrasian menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Kendala klasik, seperti keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara, sering kali mengemuka setiap ada usulan pembentukan kantor satuan kerja (satker) baru. Namun, jika merujuk pada strategi pengembangan kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), terdapat ruang improvisasi kebijakan yang bisa diambil secara bertahap. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dapat menginisiasi pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) atau Pos Pelayanan Imigrasi darurat sebagai langkah awal yang realistis, tanpa harus menunggu kesiapan anggaran untuk membangun gedung permanen yang megah dan berbiaya besar.

Selain itu, program pelayanan keimigrasian keliling yang menjangkau tingkat kecamatan secara berkala dapat menjadi instrumen transisi yang efektif. Langkah ini bisa dipadukan dengan optimalisasi sistem antrean daring serta verifikasi dokumen tahap awal secara virtual untuk memangkas durasi tatap muka. Momentum desentralisasi pelayanan sebenarnya sedang berjalan, menyusul langkah pemerintah yang meresmikan 18 kantor imigrasi baru di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan perluasan tersebut memberikan sinyal positif bahwa negara mulai menyadari pentingnya mendekatkan jarak birokrasi dengan masyarakat.

Dengan segala potensi ekonomi dan posisi geopolitiknya, Melawi yang berada di tengah Kalimantan Barat ini membutuhkan komitmen serupa. Menghadirkan layanan imigrasi di daerah ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya struktural untuk merawat kepercayaan publik terhadap narasi pemerataan pembangunan yang sering digaungkan di mimbar-mimbar resmi. Negara harus membuktikan bahwa kehadirannya tidak boleh menyusut ketika koordinat wilayah makin menjauh dari pusat kekuasaan. ■



Tren *Zero Post*: **KETIKA KOSONG MENJADI SEBUAH SIKAP**

Mengosongkan akun media sosial menjadi tren di kalangan gen Z dan milenial. Namun, akun-akun kosong ini bukanlah akun palsu atau bot. Mereka menjadi bentuk baru perlawanan terhadap komodifikasi diri dan pencurian data pribadi.

■ Penulis: Tri Andini

Pernahkah Anda mengunjungi profil media sosial seorang teman hanya untuk menemukan pemandangan yang ganjil? Jumlah pengikut (*follower*) akun

tersebut mungkin mencapai ribuan, daftar akun yang diikuti (*following*) bergerak aktif dan bertambah setiap hari, tetapi kolom unggahannya bersih total tanpa satu pun foto atau video.

Tidak ada arsip liburan masa lalu, tidak ada unggahan kopi estetik di kafe hit pada akhir pekan, bahkan tidak ada foto profil yang memperlihatkan wajah pemiliknya dengan jelas.

Fenomena ganjil ini tidak terjadi karena akun mereka sedang diretas, dan bukan pula karena pemiliknya telah memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari dunia maya akibat patah hati. Sebaliknya, mereka justru sangat aktif di

KINI, ESTETIKA *ZERO POST* JUSTRU DIANGGAP SEBAGAI SIMBOL KEMEWAHAN BARU YANG SANGAT BERKELAS.

mendalam dari kelelahan digital (*digital burnout*) yang akut serta pencarian radikal terhadap privasi yang autentik di tengah dunia yang terlalu bising.

Ilusi Koneksi dan Kelelahan Kurasi Kehidupan

Ada dua tekanan utama yang tanpa sadar telah menjebak masyarakat modern dalam lingkaran setan digital ini. *Pertama*, tuntutan estetika yang melelahkan. Kita seolah-olah dipaksa oleh norma sosial digital untuk menjadi kurator profesional bagi kehidupan kita sendiri. Sebuah foto sederhana tidak lagi cukup untuk diunggah begitu saja; foto tersebut harus melewati proses penyuntingan warna yang rumit. Takarir (*caption*) harus dipikirkan matang-matang agar terdengar cerdas. Skema warna keseluruhan unggahan profil harus terlihat senada demi memuaskan mata orang lain yang mungkin melihat akun kita.

Kedua, komodifikasi diri dan objektifikasi angka. Sadar atau tidak, kita telah mulai memperlakukan diri sendiri layaknya sebuah merek dagang (*brand*). Kita mulai menghitung dan mengukur nilai diri, kebahagiaan, bahkan tingkat kesuksesan sosial berdasarkan metrik digital yang fana, seperti jumlah tanda suka (*like*), komentar pujian, dan banyaknya jumlah tayangan (*view*).

Kini konsep privasi sering kali disalahartikan oleh masyarakat umum sebagai tindakan mengisolasi diri atau bersikap antisosial. Jika seseorang tidak eksis di media sosial, ia sering kali dicap sebagai orang yang kurang pergaulan atau ketinggalan zaman.

Padahal, para pelaku *zero post* tidak sedang mengasingkan diri ke gua terpencil tanpa sinyal internet. Mereka tetap ingin tahu kabar dunia, membaca berita, dan menjaga silaturahmi dengan jaringan pertemanan mereka. Mereka hanya menolak menjadikan kehidupan pribadi, emosi, dan momen intim sebagai komoditas konsumsi publik.

Menikmati JOMO secara Radikal

Fenomena *zero post* juga menandai adanya pergeseran psikologis yang masif dalam lanskap budaya populer, yaitu transisi dari era *fear of missing out* (FOMO) menjadi *joy*

of missing out (JOMO). Dahulu, ada ketakutan kolektif yang menghantui masyarakat bahwa jika seseorang tidak mengunggah sebuah momen penting dalam hidup ke media sosial, momen indah itu dianggap tidak pernah benar-benar terjadi. "*No pic = hoax*," begitu seloroh warganet yang sering kita baca di kolom komentar.

Secara sosiologis, tren *zero post* ini telah berhasil mengubah lanskap interaksi digital kita secara fundamental. Pola yang dahulu didominasi oleh ekshibisionisme massal kini perlahan beralih menjadi sebuah bentuk pemantauan pasif yang jauh lebih sehat dan fungsional. Media sosial tidak lagi berfungsi sebagai panggung narsisisme tempat setiap orang berteriak meminta perhatian, melainkan beralih fungsi menjadi sebuah surat kabar pribadi yang interaktif dan efisien.

Akun-akun dengan konsep *zero post* bertindak sebagai audiens cerdas yang menggunakan media sosial murni sebagai alat utilitas untuk mendukung produktivitas. Mereka memanfaatkan media sosial guna mencari informasi terkini, menikmati konten hiburan yang berkualitas, mengikuti perkembangan tren industri, atau sekadar memantau portofolio pekerjaan dari para profesional di bidangnya.

Mereka tidak lagi merasa perlu ikut berkontribusi menambah sampah visual di internet yang sudah terlalu menumpuk. Di samping itu, fenomena ini juga menjadi sebuah tampanan keras bagi algoritma media sosial yang terkenal sangat rakus akan data pribadi pengguna. Platform-platform raksasa ini sengaja dirancang untuk memanen data perilaku dari apa pun yang kita unggah, tulis, dan bagikan, yang kemudian akan dikemas untuk dijual kepada pihak pengiklan dengan harga fantastis.

Tren *zero post* di media sosial bukanlah fenomena aneh ataupun ketinggalan zaman. *Zero post* menjadi sebuah bentuk kedewasaan digital (*digital maturity*) di tengah masyarakat modern. Saat ini, kita sedang menyaksikan sebuah fase penting ketika generasi muda mulai meleak, kritis, dan berani mengambil sikap terhadap dampak paparan dunia maya bagi kesehatan mental mereka. ■

Sumber: freepik.com

sana: menyukai unggahan Anda secara berkala, menonton setiap tayangan cerita (*story*) Anda dalam hitungan menit, aktif mengirimkan pesan interaktif melalui pesan langsung (*direct message/DM*), atau membagikan video lucu yang mereka temukan di lini masa (*timeline*). Selamat datang di era *zero post*.

Tren mengosongkan lini masa ini sedang merebak secara masif di kalangan gen Z dan milenial. Di platform seperti Instagram, TikTok, hingga X (Twitter), tindakan sengaja untuk tidak mengunggah apa pun kini telah bergeser menjadi sebuah pernyataan sikap yang tegas. Dahulu, akun tanpa konten sering kali dicurigai sebagai akun palsu atau bot. Kini, estetika *zero post* justru dianggap sebagai simbol kemewahan baru yang sangat berkelas. Fenomena ini merupakan refleksi

Tepis Stigma “Si Pemalas”:

MENGENAL ADHD PADA ORANG DEWASA

ADHD pada orang dewasa sebenarnya bukan soal kemalasan atau masalah perilaku, melainkan perbedaan neurologis yang membutuhkan pendekatan khusus. Individu dengan ADHD membutuhkan strategi pengelolaan diri yang tepat serta lingkungan kerja yang mendukung.

■ Penulis: Amelia Choirun Nisa, psikolog klinis RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur

Pernah melihat rekan kerja yang selalu datang terlambat selama berbulan-bulan, atau meja kerjanya tetap berantakan walau ia sudah berniat merapkannya seminggu sebelumnya? Atau bahkan, ada puluhan tab yang terbuka di peramban komputernya?

Ada yang berkata ia pemalas, tidak disiplin, atau tidak bisa bekerja. Namun, di balik itu, ia sebenarnya telah berusaha keras, bahkan memberikan tekanan berlebihan pada diri sendiri. Bisa jadi, apa yang ia alami adalah bentuk kecenderungan ADHD (*attention deficit/hyperactivity disorder*) atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH).

Dialami Anak maupun Orang Dewasa

Menurut DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*), ADHD merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan kesulitan fokus, impulsivitas, dan mudah terdistraksi. Gejala ADHD sering kali tidak terdeteksi pada saat anak-anak dan baru terdiagnosis secara jelas ketika seseorang sudah dewasa. Gejalanya pun mungkin sudah berbeda dengan gejala pada anak-anak. Pada orang dewasa, ciri hiperaktif mungkin telah banyak berkurang, tetapi kesulitan mengendalikan impuls, merasa gelisah, serta kesulitan berkonsentrasi tetap berlanjut.

ADHD adalah bagian kecil dari spektrum bernama neurodivergen. Sekitar 15–20% populasi di dunia adalah neurodivergen. Artinya, satu dari lima orang di sekitar kita memiliki otak yang bekerja dengan cara yang berbeda. Neurodivergen bukan

hanya ADHD, melainkan juga autisme, disleksia, dispraksia, diskalkulia, sindrom Tourette, sinestesia, dan *hyperlexia*.

Mengenal Ciri-Ciri ADHD

Beberapa ciri-ciri ADHD dapat dikenali pada individu yang mengidapnya. Meski tidak bisa digunakan untuk penegakan diagnosis, berikut adalah beberapa poin sebagai refleksi untuk mengenali ciri-ciri ADHD yang mungkin sudah terjadi sejak remaja hingga dewasa.

- Kesulitan berkonsentrasi pada waktu lama, seperti saat membaca
- Sulit memulai tugas meskipun tahu itu penting dan tenggat waktu sudah dekat
- Mudah teralih oleh suara atau hal-hal lain di sekitar
- Lupa akan janji rapat, tenggat waktu, atau instruksi
- Cenderung mudah kehilangan barang dan lupa meletakkan barang
- Terlalu fokus dengan satu pekerjaan hingga tanggung jawab lain terabaikan
- Sering menyela pembicaraan atau mengucapkan sesuatu sebelum berpikir panjang
- Mudah merasa frustrasi, marah, atau terpuruk saat dikritik untuk hal sepele
- Sering tidak memperhatikan detail dengan saksama
- Sering berganti pekerjaan atau sering putus *nyambung* dalam hubungan asmara

Jika mengalami lebih dari lima hal di atas, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog klinis atau psikiater untuk mendapatkan asesmen yang komprehensif serta diagnosis pasti.

ADHD dalam Keseharian

Selain ciri-ciri di atas, ada beberapa perilaku yang mengarah pada ADHD yang sering dianggap sepele, salah satunya hiperfokus. Hiperfokus adalah kemampuan untuk “terkunci” pada tugas yang sama selama berjam-jam. Hiperfokus bisa menyebabkan seseorang “terserap” sangat dalam untuk melakukan hal yang disukainya hingga tanggung jawab lain terabaikan.

Ada pula fenomena yang berkaitan dengan ADHD yang jarang teridentifikasi, yaitu sifat *workaholic*. Seseorang dengan ADHD pada usia dewasa sering tidak terdiagnosis karena menganggap sifat ini sebagai konsekuensi pekerjaan agar bisa mengejar ketertinggalan. Sifat impulsif juga membuat seseorang dengan ADHD cenderung berkomitmen berlebihan dalam mengambil terlalu banyak pekerjaan. Padahal, aktivitas berlebihan dan kesulitan mengatur waktu istirahat hanya akan memperburuk kondisinya. Hal ini akan berujung pada stres kronis, *burnout*, atau bahkan depresi.

Selain itu, ada banyak studi yang menyebutkan bahwa ADHD pada orang dewasa menunjukkan kecenderungan spontanitas,

kecerdasan sosial, humor, serta empati yang tinggi. Kecenderungan ini dapat bermanfaat dalam membangun hubungan interpersonal.

Mengatasi Tantangan ADHD

Gejala ADHD dapat dikelola dengan berbagai cara, termasuk perubahan gaya hidup, penyesuaian di tempat kerja, serta penanganan yang tepat. Sebagai permulaan sebelum berkonsultasi lebih lanjut dengan ahli, langkah-langkah berikut dapat dicoba.

- **Kenali diri**

Luangkan waktu untuk mencari tahu penyesuaian apa yang telah dilakukan dan sedang diupayakan untuk mengenali ciri-ciri ADHD pada diri. Jika kesulitan melakukannya sendiri, hubungi profesional, seperti psikolog klinis dan psikiater. Jika sudah mengganggu keseharian, pengobatan bisa didapatkan dari psikiater,

begitu pula psikoterapi bersama psikolog klinis.

- **Kelola waktu dengan sistem eksternal**

Gunakan pewaktu (*timer*) fisik, kalender digital, notifikasi, dan bagan lini masa (*timeline chart*) untuk memecah proyek besar menjadi bagian-bagian kecil dengan tenggat yang bertahap.

- **Jaga kondisi fisik**

Lakukan olahraga secara intensif. Olahraga bagi orang dengan ADHD dapat meningkatkan kadar dopamin dan norepinefrin, dua neurotransmitter yang penting untuk meningkatkan fokus. Jaga pola makan dengan makanan tinggi protein dan rendah gula.

- **Tidur terstruktur**

Tingkatkan durasi tidur dan

jaga kebiasaan tidur yang baik. Jadwal tidur yang konsisten dan tidak terganggu mendorong otak untuk beristirahat.

Dukungan di Dunia Kerja

ADHD pada orang dewasa sering dianggap sebagai masalah perilaku ketika nyatanya bukan. Perbedaan neurologis ini membutuhkan akomodasi dan dukungan yang tepat. Di lingkungan kerja, hal-hal sederhana yang bisa dilakukan adalah memberikan instruksi secara tertulis, menyediakan ruang kerja pribadi yang tenang, memberikan bantuan untuk mengatur tugas, dan memberikan waktu ekstra untuk transisi antartugas. Yang terpenting, hindari menyimpulkan secara sepihak bahwa individu tersebut “tidak bersedia bekerja sama” ketika yang terjadi adalah “tidak bisa bekerja dengan cara yang sama”. ■

Kemalasan di tempat kerja (ilustrasi) (Sumber: iStock)





Tinggal berdampingan dengan laut dari generasi ke generasi (ilustrasi) (Foto: Riky Ardiansyah)

Suku Laut: **ANAK SERIBU PULAU DI PERAIRAN LINGGA**

Di tengah modernisasi yang memelasat cepat, suku Laut hidup sebagai pewaris pengetahuan maritim, penjaga sunyi Selat Malaka, dan saksi bisu kejayaan Kesultanan Melayu. Namun, di balik ketangguhan mereka, tersimpan sederet tantangan yang menguji eksistensi suku Laut di tengah arus perubahan zaman.

■ Penulis: Rendy Firnanda

Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia hidup nyaman berdampingan dengan teknologi digital, akal imitasi (AI), dan modernisasi yang bergerak begitu cepat, masih ada sekelompok masyarakat di Kepulauan Riau yang mempertahankan cara hidup warisan leluhur selama berabad-abad. Mereka adalah suku Laut, kelompok masyarakat yang turun-temurun menjadikan laut sebagai pusat kehidupan.

Berdampingan dengan Lautan

Mereka tidak tumbuh bersama gedung-gedung tinggi atau hiruk pikuk perkotaan, tetapi bersama pasang surut air laut, arah angin, dan perpindahan musim yang menentukan arah pelayaran. Bagi mereka, laut bukan sekadar sumber penghidupan. Laut adalah rumah, ruang belajar, sekaligus warisan budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di atas perahu atau sampan beratapkan kajang, suku Laut menjalani hampir seluruh siklus kehidupan—lahir, tumbuh, mencari nafkah, membangun keluarga, hingga menghabiskan sebagian besar hidup di atas perairan Kepulauan Riau. Mereka berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya atau menyusuri muara sungai untuk mencari ikan. Pola hidup seperti itu membuat mereka dijuluki sebagai Anak Seribu Pulau.

Kehidupan suku Laut sering dibandingkan dengan suku Bajo karena keduanya dikenal sebagai masyarakat laut. Namun, keduanya memiliki akar sejarah dan wilayah persebaran yang berbeda. Suku Bajo banyak tersebar di wilayah timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara. Sementara itu, suku Laut

banyak mendiami wilayah perairan dan pesisir Kepulauan Riau, seperti Batam, Bintan, dan Lingga, serta sebagian pesisir timur Sumatra hingga Kepulauan Bangka Belitung.

Suku Bajo dikenal luas sebagai “manusia laut” karena kemampuan menyelamnya hingga puluhan meter ke dasar laut, menombak ikan di kedalaman laut, dan menangkap hasil laut lainnya. Sementara itu, suku Laut memiliki keistimewaan yang berbeda. Mereka dikenal sebagai “pembaca laut”. Mereka memiliki pengetahuan mendalam yang diwariskan secara turun-temurun tentang arah angin, perubahan cuaca, jalur antarpulau, hingga karakter perairan Selat Malaka.

Kemampuan “membaca laut” menjadikan mereka memiliki posisi penting dalam sejarah Kesultanan Melayu. Dalam berbagai catatan sejarah, suku Laut tidak hanya dikenal sebagai nelayan. Mereka merupakan penjaga wilayah perairan kesultanan, penunjuk arah pelayaran, pasukan perang, sekaligus penyedia berbagai kebutuhan laut bagi Kesultanan Riau-Lingga-Johor.

Jika suku Bajo dikenal dunia sebagai pengembara lautan Nusantara, suku Laut adalah penjaga sunyi Selat Malaka. Mereka mungkin tidak setenar Bajo dalam berbagai dokumenter internasional, tetapi sejarah mencatat bahwa suku Laut pernah menjadi mata

dan telinga kerajaan-kerajaan Melayu.

Hingga kini, laut tetap menjadi sumber utama penghidupan mereka. Dengan alat tangkap tradisional, seperti tombak, pancing, jaring, dan sondong, mereka mencari ikan, teripang, dan berbagai hasil laut lainnya. Sebagian hasil tangkapan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara sisanya dijual kepada para pengepul sebagai sumber penghasilan. Daratan hanya menjadi tempat untuk mengambil air bersih, menjual hasil tangkapan, atau menguburkan anggota keluarga yang meninggal dunia.

Tantangan dari Pesisir

Meski zaman telah berubah dan sebagian besar suku Laut kini telah menetap di daratan, jejak kehidupan bahari masih begitu kuat melekat dalam keseharian mereka. Pemerintah telah membangun permukiman di sejumlah kawasan pesisir sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan akses layanan publik. Namun, bagi sebagian keluarga, rumah-rumah tersebut lebih sering menjadi tempat singgah daripada tempat tinggal utama.

Di balik ketangguhan mengarungi lautan, mobilitas antarpulau yang tinggi membuat suku Laut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan layanan publik lainnya hingga

tekanan terhadap mata pencaharian akibat menyusutnya wilayah tangkap serta persaingan dengan nelayan modern yang memiliki teknologi dan armada lebih besar. Situasi pun makin kompleks karena sebagian besar suku Laut hidup dekat perbatasan Malaysia dan Singapura.

Oleh karena itu, kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tempat mereka hidup dan berkembang. Makin banyak anak-anak suku Laut yang mengenyam pendidikan, memiliki identitas kependudukan yang jelas, serta memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan publik. Upaya menghadirkan negara hingga ke pulau-pulau kecil dan kawasan pesisir pun terus dilakukan agar mereka dapat menikmati hak yang sama sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Suku Laut lebih dari sekadar cerita tentang hidup di atas sampan atau berpindah pulau. Mereka adalah bagian dari peradaban maritim Melayu, penjaga pengetahuan laut yang diwariskan lintas generasi, sekaligus saksi sejarah Selat Malaka. Dari perairan Lingga, keberadaan mereka mengingatkan bahwa laut bukan hanya ruang penghidupan, tetapi juga ruang budaya yang menyimpan warisan berharga bagi Indonesia. ■



Seorang anak yang hidup dekat dengan laut (ilustrasi) (Foto: Riky Ardiansyah)

Tren Usaha Sampingan: **SALDO BERTAMBAH, DI KANTOR TETAP AMANAH**

Di tengah kesibukan sebagai insan Imigrasi, sebagian orang menemukan ruang untuk terus mengembangkan diri. Dengan kejelian melihat peluang, hobi dapat berkembang menjadi usaha sampingan yang bernilai ekonomi sekaligus menjadi sarana aktualisasi diri. Berikut beberapa kisah dan inspirasi usaha mereka.



“

Vania Riana Rumenta
(Kantor Imigrasi Jakarta Barat)
Instagram & TikTok:
@rumentacakery

Vira, seorang petugas imigrasi, menahan rindu pada orang tua di kampung. Pagi itu, di bandara, rutinitasnya terusik oleh seorang gadis muda yang tampak gelisah. Tujuannya Kamboja, tetapi ia hanya membawa tas usang, tanpa tiket pulang, tanpa bukti penginapan. Suaranya bergetar saat mengaku dijanjikan pekerjaan bergaji besar oleh kenalan di Facebook.

Hati Vira mencelus. Ia paham, ini jebakan. Dengan sigap, ia memanggil petugas dan menghentikan keberangkatan gadis itu. Saat semuanya usai, Vira tersenyum tipis. Ia sadar, Kartini masa kini tak selalu menulis. Kadang, ia berjaga di balik loket, melindungi sesama.

Ogi Dani Kurniawan
(Kantor Imigrasi Cilegon)

Instagram: **@esas.management**
Menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan berarti berhenti berkembang. Saya memiliki keinginan kuat untuk membagikan pengetahuan dan ilmu yang saya miliki melalui kegiatan mengajar. Namun, saya sempat dihadapkan pada pilihan sulit ketika mendapat tawaran menjadi dosen di sebuah universitas swasta. Jika diterima, saya harus melepas status ASN saya. Akhirnya, saya memilih tetap mengabdikan sebagai ASN dan mencari jalan lain dengan menjadi pelatih daring di Esas Management.

Melalui usaha sampingan sebagai pelatih di Esas Management, saya bisa mengajar di luar jam dinas dengan fleksibilitas penuh. Kini, saya mengampu kelas berdasarkan kriteria dan bidang yang selama ini saya geluti di dunia kerja, yaitu pelayanan publik.

”



Roswita Murtika Mere
(Kantor Imigrasi Atambua)
Instagram: **@sliceandblissatambua**

Sejak 2025, saya memutuskan untuk membuka usaha sampingan (*side hustle*). Berbekal oven tangkring, pengocok, dan resep dari tetangga, saya mulai berjualan bolu. Mulanya, saya membuat bolu pisang dan bolu kenari, kemudian sampelnya dibagikan ke teman-teman kantor. Dari dua bolu tersebut, sekarang saya juga membuat bronis dan bolu pandan keju. Tentunya kue-kue ini dibuat jika ada pesanan sehingga dipastikan *fresh from the oven*. Saya menekuni usaha ini sebagai hobi untuk mengisi waktu luang pada Sabtu dan Minggu. Usaha ini belum besar. Namun, yang pasti, saya tidak khawatir lagi saat tanggal tua. He-he-he.



Fitri Daniyati
(Kantor Imigrasi Cilegon)

Instagram: @asinanmamapiti

Berawal dari ketidaksengajaan memanfaatkan stok buah saat Covid-19, Asinan Mama Piti lahir dari dapur rumah bermodal 15 cangkir untuk grup rukun tetangga (RT). Modifikasi asinan Bogor tanpa timun dengan kuah kiamboy dan kemasan yang menarik ini sukses memikat pasar hingga merambah ke layanan pesan antar daring (*online*). Menu pun berinovasi ke salad buah premium.

Tantangan muncul saat tuntutan waktu bentrok dengan dedikasi profesi di Imigrasi. Mencoba bertahan berjualan pada malam hari justru memicu kelelahan fisik. Keputusan berat untuk vakum terpaksa diambil demi menjaga performa kerja. Meski begitu, loyalitas pelanggan tak surut—pesanan prapesan dan ibu hamil yang mengidam pun sesekali membuat saya buka kembali.

Dapot Silalahi

(Kantor Imigrasi Jambi)

Instagram: @silalahidapot,

@biyasacafebilliard, @cangjoid

Di luar tugas utama sebagai ASN Imigrasi, saya menjalankan beberapa usaha sampingan yang saya kerjakan di luar jam dinas. Setiap akhir pekan, saya menjadi pembawa acara berita di TVRI Jambi serta pembawa acara di berbagai kegiatan formal dan kenegaraan. Selain itu, sejak 2025, saya juga merintis sebuah kedai kopi di Jambi sebagai ruang berkumpul dan berkreasi bagi anak muda. Semua usaha tersebut saya jalankan dengan manajemen waktu yang disiplin, tanpa mengganggu tanggung jawab utama sebagai ASN.

Bagi saya, usaha sampingan tidak hanya menambah penghasilan, tetapi juga ruang untuk mengembangkan minat, relasi, dan keberanian mencoba hal baru.



Muhammad Fahreza Firdaus

(Kantor Imigrasi Nunukan)

Instagram: @boxkajut

Di sela-sela tugas sebagai insan Imigrasi, saya memiliki usaha sampingan berupa kerajinan (*craft*) yang produk andalannya adalah kotak yang dapat mekar atau biasa disebut kotak kejutan (*exploding box*), bingkai (*frame*) 3D atau yang biasa dikenal sebagai *pop-up frame*, dan hadiah unik lainnya. Semua produk dibuat sesuai dengan keinginan pembeli sehingga setiap hadiah punya cerita dan kesan tersendiri. Alhamdulillah, produk ini sudah dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan beberapa negara.

Bagi saya, usaha ini bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga sarana menyalurkan kreativitas, *healing* sesaat, dan berbagi kebahagiaan ke banyak orang. Penasaran? Yuk, kepoin media sosial boxkajut.

Wahyuni

(Kantor Imigrasi Tangerang)

Instagram: @officialcuciexpress

Saya adalah pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang yang menjalankan usaha sampingan cuci helm sejak 2010. Dulu, banyak orang bertanya, “Memangnya helm bisa dicuci?” Namun, saya melihat peluang dari kebutuhan perawatan helm yang saat itu masih jarang.

Seiring meningkatnya minat masyarakat, saya mulai membuka kemitraan tanpa biaya bulanan maupun tahunan. Usaha ini kemudian berkembang ke cuci sepatu pada 2019, pengembangan mesin swalayan (*self-service*) spa helm otomatis bersistem QRIS pada 2025, dan pengembangan mesin layanan mandiri penatu bersistem QRIS pada 2026. Hingga kini, lebih dari 1.000 unit mesin usaha telah digunakan mitra di Indonesia hingga Malaysia.





ARAH KERJA IMIGRASI

Pelayanan publik bukan sekadar prosedur, tetapi kehadiran negara yang dirasakan. **Integritas, pelayanan, penegakan hukum, dan inovasi** menjadi fondasi utama dalam setiap langkah kerja Imigrasi.



Integritas

Menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan



Inovasi

Terus berinovasi untuk pelayanan yang lebih mudah, efektif, dan modern



Pelayanan

Memberikan layanan cepat, tepat, dan berorientasi pada masyarakat



Penegakan Hukum

Menegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan tanpa pandang bulu

IMIGRASI UNTUK RAKYAT



Imigrasi hadir untuk melayani, melindungi, dan memberikan kepastian hukum dengan hati.

Integritas adalah kompas, **pelayanan** adalah komitmen, dan **pengabdian** adalah jalan.



HENDARSAM

Hendarsam Marantoko
Direktur Jenderal Imigrasi

MENYISIR HARAPAN DI BALIK JERUJI DEPOT TAHANAN

Sebuah selat sempit antara Indonesia dan Malaysia menjadi saksi kompleksnya hidup pekerja migran Indonesia di rantau orang. Di empat wilayah Malaysia, KJRI Johor Bahru memikul tanggung jawab penting: memastikan negara hadir bagi warganya yang tersangkut masalah hukum, kehilangan dokumen, hingga terdampar di balik jeruji depot imigrasi.

■ Penulis: Yolanda Rosylvia Juniar

Sebuah selat sempit memisahkan Batam dan Kepulauan Riau dengan Semenanjung Malaysia. Amat dekatnya jarak membuat pendar lampu dari pesisir Johor Bahru bisa terlihat jelas dari seberang utara Indonesia saat malam cerah. Kedekatan geografis ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi pintu rezeki

terbuka, tetapi di sisi lain tersimpan kerentanan yang kompleks bagi ratusan ribu pekerja migran Indonesia (PMI).

"Wilayah kerja kami meliputi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Pahang. Luasnya mencapai 63.248 kilometer persegi, hampir sepertiga Semenanjung Malaysia," ujar Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)

Johor Bahru Wahyu Kusumanegara saat berbincang dengan redaksi *BhumiPura* pada Mei 2026.

KJRI Johor Bahru memiliki tanggung jawab besar sebagai satu-satunya perwakilan RI di Malaysia yang mengawal seluruh jenis gerbang internasional secara sekaligus: 10 pelabuhan laut, 3 bandar udara, dan 2 jalur darat via Singapura. Arus manusia yang mengalir di dalamnya begitu dinamis dan cepat.

Hingga 2025, Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM) mencatat ada 165.764 orang PMI yang tersebar di sektor perkebunan, pabrik, hingga jasa di wilayah ini. Namun, angka di atas kertas selalu lebih ramah dibanding realitas. Jumlah PMI di Negeri Jiran tersebut diperkirakan



jauh lebih besar mengingat adanya pekerja nonprosedural.

Para PMI nonprosedural ini kerap mengelabui petugas dengan praktik “*passing*”. Modusnya halus—warga negara Indonesia (WNI) masuk dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK), bekerja secara informal dalam waktu singkat, lalu pulang ke Indonesia tepat sebelum masa tinggal habis. Tak lama kemudian, mereka kembali dengan skema yang sama.

“Karena pergerakan mereka sangat cepat dan berulang, pengawasan menjadi kompleks. Di sinilah fungsi pelayanan, pengawasan, dan perlindungan harus berjalan beriringan,” lanjut Wahyu.

Jemput Bola di Balik Jeruji

Bagi WNI yang tersandung masalah hukum dan keimigrasian di Malaysia, ujung perjalanan mereka sering kali berakhir di Depot Tahanan Imigresen (DTI)—sebutan untuk ruang detensi imigrasi (*rudenim*) di Malaysia. Menunggu dideportasi di dalam depot bukanlah hal mudah. Kehilangan dokumen hingga putus komunikasi dengan keluarga menjadi cerita klise yang terus berulang.

Kendati demikian, KJRI Johor Bahru menolak mengambil sikap pasif. Melalui

layanan jemput bola (*outreach*), petugas keimigrasian rutin menyisir depot-depot tahanan hingga mendatangi WNI yang sakit di pelosok. Sepanjang awal tahun hingga Mei 2026 saja, tim telah melakukan 17 kali kunjungan ke DTI untuk melayani 1.483 tahanan WNI, mendampingi 9 proses deportasi yang memulangkan 709 orang, serta menggelar 11 aksi kemanusiaan bagi WNI rentan.

“Bagi kami, tugas Imigrasi Indonesia di sini bukan sekadar mencetak paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di dalam gedung kantor, melainkan juga menghadirkan negara untuk memberikan pendampingan yang bisa dirasakan masyarakat Indonesia di luar negeri,” papar Wahyu.

Namun, ketulusan ini tidaklah cukup untuk mengurai benang kusut birokrasi masa lalu. Sebelum 2025, proses verifikasi tahanan WNI di depot kerap berjalan lambat. Fungsi konsuler dan fungsi imigrasi bekerja di kamar terpisah secara manual. Hal ini berimbas pada duplikasi data, koordinasi antarinstansi yang tidak gesit, dan minimnya transparansi.

Imbas paling pahit dirasakan oleh para tahanan. Banyak WNI harus mendekam lebih lama di dalam depot yang kapasitasnya terbatas karena dokumen kepulangan mereka belum rampung diverifikasi.

Upaya Mengurai Sumbatan Birokrasi

Hambatan itulah yang melahirkan Si Mata Depo (Sistem Manajemen Tahanan Depot Imigresen) pada 2025. Inovasi digital ini mendisrupsi cara kerja manual menjadi satu sistem terpadu yang memangkas waktu birokrasi secara signifikan. Saat ini, Si Mata Depo telah diaplikasikan di empat titik krusial: DTI Pekan Nenas (Johor), DTI Machap Umbu (Melaka), DTI Kemayan (Pahang), dan DTI Lenggeng (Negeri Sembilan).

Melalui sistem ini, pihak DTI Malaysia dapat mengajukan permohonan SPLP bagi WNI bermasalah secara digital melalui unggahan data massal. Dengan demikian, seluruh proses verifikasi identitas, pemantauan kasus, hingga penerbitan dokumen perjalanan terpantau secara waktu nyata (*real-time*).

Tentunya sistem ini tidak bisa berjalan tanpa amunisi memadai. Untuk mengantisipasi klaim palsu atau manipulasi identitas, Si Mata Depo berkolaborasi dengan teknologi *face recognition immigration system* (FRIS) milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Sistem Informasi Administrasi Kepen-

dudukan (SIAP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dulu ada risiko SPLP terbit untuk orang yang status kewarganegaraannya abu-abu atau bahkan tidak punya garis keturunan Indonesia. Sekarang, akurasi berlapis,” jelas Wahyu.

Ketika dokumen selesai, sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis via WhatsApp kepada instansi penjemput di tanah air, mulai dari Kantor Imigrasi (Kanim) Batam, Tanjungpinang, dan Dumai, hingga Polda Kepulauan Riau. Hasilnya, sejak 2025 hingga Mei 2026, sistem ini sukses memproses 6.423 SPLP dengan tingkat akurasi tinggi. Hanya tiga kasus yang ditolak karena pemohon gagal membuktikan statusnya sebagai WNI. Penumpukan tahanan di depot pun berkurang drastis.

Keberhasilan di koridor Johor ini memicu harapan besar. Inovasi Si Mata Depo kini mulai dikenalkan dalam berbagai rapat koordinasi keimigrasian di Yogyakarta dan Jakarta. Harapannya, sistem ini kelak bisa direplikasi di perwakilan RI lainnya di Malaysia, seperti Kuala Lumpur, Penang, hingga Sabah dan Sarawak.

Tantangan Kemanusiaan

Kendati sistem digital telah mapan, tantangan terbesar di lapangan justru sering kali datang dari aspek kemanusiaan. Tidak sedikit WNI bermasalah yang masuk ke depot dalam kondisi trauma, mengalami keterbatasan literasi, hingga kehilangan dokumen sama sekali.

Nasib anak-anak pekerja migran lebih memprihatinkan lagi. Hukum Malaysia melarang pekerja asing menikah di sana. Akibatnya, banyak anak lahir tanpa orang tua yang melakukan pernikahan resmi dan tanpa dokumen (*undocumented*), membuat mereka rentan menyandang status tak berkewarganegaraan (*stateless*). Di tengah situasi pelik ini, Imigrasi bertindak sebagai unit penyokong demi aspek kemanusiaan agar anak-anak tersebut bisa pulang ke Indonesia.

Mengakhiri perbincangan, Wahyu Kusumanegara menitipkan sebuah pesan sederhana, tetapi mendalam bagi masyarakat di tanah air: “Perlindungan terbaik dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan mematuhi aturan. Jangan mudah tergiur jalur nonprosedural. Risiko hukumnya terlalu besar. Bermigrasilah secara aman, legal, dan bermartabat.” ■



Staf Teknis Imigrasi KJRI Johor Bahru Wahyu Kusumanegara menjelaskan informasi keimigrasian di Depot Tahanan Imigresen. (Foto: Dok. KJRI Johor Bahru)



“KEBAHAGIAAN ITU ABSTRAK. TEMUKAN ARTI KEBAHAGIAAN BERDASARKAN VERSIMU. TIDAK ADA SATU PUN ORANG YANG DAPAT MENDIKTE KEBAHAGIAANMU.”

Buku ini berisi refleksi psikologis tentang “realitas versus ekspektasi” dalam hidup. Pembahasan diawali dengan konsep *duck syndrome*. Konsep ini menggambarkan kesenjangan antara apa yang terlihat di luar dan kenyataan yang sesungguhnya. Setiap orang cenderung menampilkan versi terbaik dari kehidupannya. Namun, di balik itu, ada kecemasan, kegagalan, kelelahan, dan tangisan yang tidak pernah terlihat.

Jennyfer menggunakan pendekatan psikologi klinis untuk membongkar berbagai tema, seperti tekanan dari diri sendiri (*self-pressure*), kecenderungan menyenangkan orang lain (*people pleasing*), kelelahan emosional (*burnout*), luka batin, serta ekspektasi sosial.

Buku ini relevan bagi pegawai Imigrasi karena pekerjaan mereka bersinggungan langsung dengan manusia dalam situasi penuh stres. Ada tiga alasan utama mengapa buku ini penting dibaca.

Pertama, buku ini mengenalkan konsep *compassion fatigue* atau lelah berempati. Sebagai pegawai

yang dituntut tegas tetapi tetap manusiawi, lama-kelamaan hati bisa menjadi tumpul. Buku ini mengajarkan cara menetapkan batasan secara psikologis dengan prinsip bahwa menolong tidak berarti menanggung beban orang lain sepenuhnya.

Kedua, buku ini memberikan cara menghadapi proyeksi dan amarah orang lain. Saat berhadapan dengan masyarakat yang beragam, buku ini mengingatkan bahwa “Ini bukan tentang kamu”—sehingga kita tidak mudah terbawa perasaan dan mental tetap stabil dalam bertugas.

Ketiga, buku ini membantu melepaskan ekspektasi bahwa pegawai harus selalu kuat dan ramah. Banyak pegawai negeri merasa tidak boleh menunjukkan kelemahan. Buku ini mengingatkan bahwa “Boleh, kok, merasa tidak oke” untuk mencegah penumpukan stres hingga berdampak pada kesehatan fisik.

(+) Kelebihan Buku

Meskipun menggunakan istilah psikologi, contoh-contoh yang disajikan dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami. Buku ini juga memberikan validasi emosi, terutama bagi pegawai di garda

depan pelayanan, dengan mengakui bahwa rasa lelah dan kecewa adalah hal yang wajar. Setiap bab dilengkapi pertanyaan *journaling* yang berguna untuk refleksi. Selain itu, ilustrasi yang menarik di setiap halaman membuat pembaca betah menyelami isi buku.

(-) Kekurangan Buku

Buku ini bersifat reflektif, bukan buku teknis atau panduan prosedur operasional standar (POS) atau *standard operating procedure* (SOP). Oleh karena itu, jangan berharap menemukan “kiat 5 langkah lolos audit” atau sejenisnya. Buku ini ditujukan untuk jiwa, bukan untuk administrasi.

Buku ini layak dibaca karena pekerjaan di Imigrasi, terutama pada garda depan, memerlukan kesehatan mental, bukan sekadar patuh pada SOP. Menjadi “penentu nasib” orang lain bisa menjadi beban tersendiri. Buku ini mengajarkan bahwa profesional tidak harus sempurna dan dapat membantu memisahkan urusan kantor dan pribadi, serta menjadi alat pemeriksaan mental sepulang kerja. Cocok untuk pegawai pemula, petugas kantor layanan, atau siapa pun yang lelah meski sudah bekerja dengan maksimal. ■

Judul Buku : *Sebenarnya Hidupku Tidak Semulus Itu*
Penulis : Jennyfer, M.Psi., Psikolog
Penerbit : Andam
Tahun Terbit : 2022
Halaman : v + 114 halaman
Genre : Pengembangan Diri, Kesehatan Mental

Lepas Ekspektasi, **JAGA HATI DI TENGAH TUNTUTAN PROFESI**

Pernah lelah menjadi pendengar dan penolong, tetapi hati makin tumpul? Buku ini mengajak pembaca melepas ekspektasi sempurna agar tetap profesional tanpa kehilangan diri.

■ Penulis: Fipit Fatimah



PERSYARATAN PASPOR ANAK

Dokumen Persyaratan

- KTP elektronik ayah atau ibu
- Kartu keluarga
- Akta kelahiran
- Akta perkawinan atau buku nikah orang tua
- Paspor lama anak (untuk penggantian)
- Fotokopi paspor ayah atau ibu bagi yang memiliki



Jangan Lupa!

- Sediakan meterai Rp10.000.
- Kedua orang tua harus mendampingi saat pembuatan paspor.
- Serahkan surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan paspor anak.



Informasi Penting

Bayi di bawah 5 tahun (balita) **tidak perlu mendaftar** di aplikasi M-Paspor.





Lokakarya kehumasan di Kantor Imigrasi Dabo Singkep (Foto: Dok. Kanim Dabo Singkep)



Petugas imigrasi Arab Saudi yang bertugas pada Makkah Route (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Petugas imigrasi membantu pemohon paspor pada acara BTV Sen Berpesta 2026. (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)

Proses pengambilan foto biometrik di kantor imigrasi
(Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Sejumlah WNA yang berhasil diamankan Ditjen Imigrasi
dalam penangkapan di Hayam Wuruk, Jakarta Barat
(Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Turis asing saat menggunakan autogate di Bandara Internasional I Gusti
Ngurah Rai, Bali (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



ADEK NO-NO, YA, JANGAN DIRUSAK PASPORNYA!



Oleh: Made Donik

Perluas Jangkauan, Dekatkan Layanan

18 Kantor Imigrasi Baru Telah Hadir



Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 4 November 2025

SPORT & PERFORMER *Visas*

Shine on our stages through our
Sport (C8) & Performer (C7) Visas

Apply now at evisa.imigrasi.go.id

